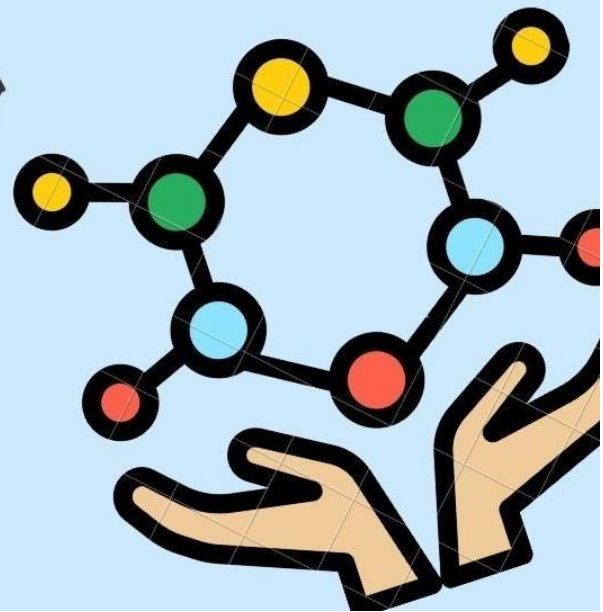
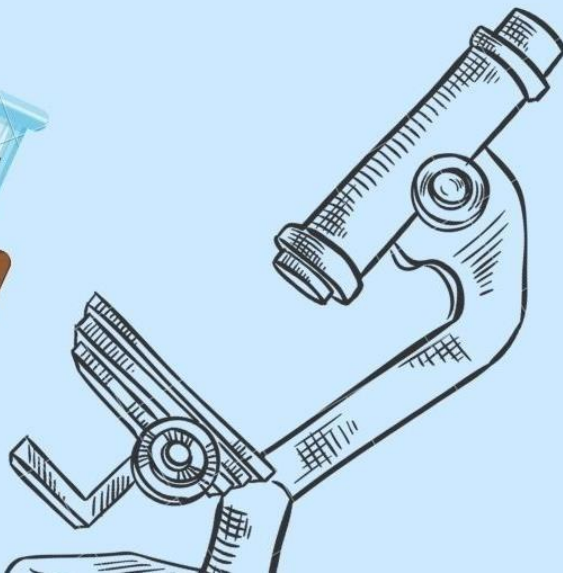
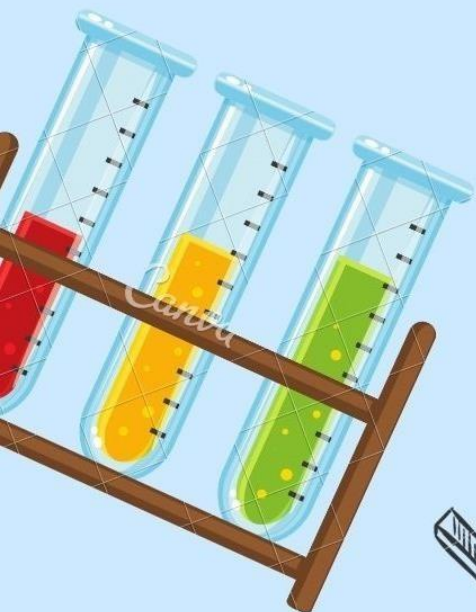
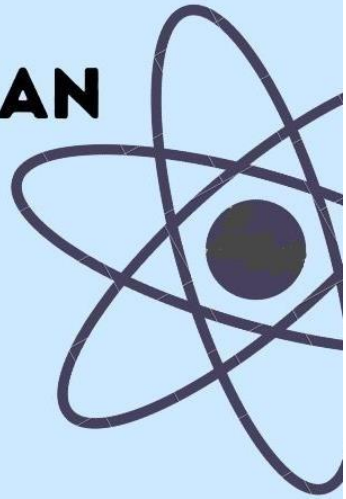


LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN IV TAHUN 2021

**PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL**



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

Penanggung Jawab

Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.

Ketua

Dra. Sutanti Siti Namtini, Apt, Ph.D

Anggota

1. Rina Azhariyati, S.Si., Apt.
2. Dra. Arum Prasetyaningtyas, Apt, M.Si
3. Henry Handoyo, S.Si, M.Si
4. Dra. Sitoresmi Triwibowo
5. Lilik Budiati, S.Si, Apt
6. Wiratmoko Dani Kusuma, S.Si.
7. Endah Kristiana, S.Si, M.Si
8. Nur Aini, S.Si, M.Sc
9. Prima Purnama, S.Farm
10. Mia Riska, S.Si
11. Adinda, ST
12. Garit Bian Priangga. S, A.Md

KATA PENGANTAR



Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja PPPOMN Triwulan IV (TW IV) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja sampai dengan TW IV tahun 2021, disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis PPPOMN Tahun 2020-2024 yang terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan dan diuraikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Eselon II Tahun 2021.

Laporan Kinerja TW IV tahun 2021 menyajikan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW IV, sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi mandiri (*self evaluation*) atas perencanaan dan pencapaian kinerja PPPOMN.

Capaian target kinerja ini merupakan hasil kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan PPPOMN, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami berharap penyajian Laporan Kinerja PPPOMN TW IV tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi selanjutnya.

Jakarta, 20 Januari 2022

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional

Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	9
BAB I - PENDAHULUAN.....	11
1.1 Tugas dan Fungsi.....	11
1.2. Struktur Organisasi.....	13
1.3 Permasalahan Utama.....	16
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	17
2.2 Sasaran Strategis	18
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	29
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021	32
3.2 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021.....	82
3.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan.....	90
BAB IV - PENUTUP	93
4.1. Kesimpulan	93
4.2 Saran	94
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 2 PPPOMN.....	20
Tabel 2. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Strategis dan IKSS di Pusat Pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional Sesuai Renstra PPPOMN 2020-2024.....	28
Tabel 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN	30
Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2021.....	32
Tabel 5. Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan laboratorium/pengujian tahun 2020 dan tahun 2021	35
Tabel 6. Responden SKM Menurut Tabel Krejcie & Morgan.....	39
Tabel 7. Nilai SKM Tiap Layanan pada Triwulan IV Tahun 2021	39
Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan pada Triwulan IV Tahun 2021	40
Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik pada Triwulan IV Tahun 2021	40
Tabel 10. Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021.....	44
Tabel 11. Hasil Penilaian Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Tahun 2021	47
Tabel 12. Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium BB/Balai POM sesuai standar kemampuan laboratorium tahun 2020 dan tahun 2021	48
Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2020 dan tahun 2021	51
Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2020 dan tahun 2021	53
Tabel 15. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan IV Tahun 2021	55
Tabel 16. Perbandingan capaian kinerja persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar tahun 2020 dan tahun 2021	57
Tabel 17. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	60
Tabel 18. Perbandingan capaian kinerja persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2020 dan tahun 2021	61
Tabel 19. Perbandingan capaian kinerja indeks pelayanan publik PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021	63
Tabel 20. Perbandingan capaian indikator kinerja persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif tahun 2020 dan tahun 2021	65
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN	67
Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021	67
Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021	70

Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021.....	73
Tabel 25. Dimensi Kualifikasi ASN PPPOMN tahun 2021.....	74
Tabel 26. Dimensi Kompetensi Diklat Kepemimpinan ASN PPPOMN tahun 2021.....	74
Tabel 27. Dimensi Kompetensi Diklat Fungsional JF ASN PPPOMN tahun 2021	75
Tabel 28. Dimensi Kompetensi Diklat Teknis 20 JP ASN PPPOMN tahun 2021	75
Tabel 29. Dimensi Kompetensi Seminar ASN PPPOMN tahun 2021.....	75
Tabel 30. Dimensi Kinerja ASN PPPOMN tahun 2021.....	75
Tabel 31. Dimensi Disiplin ASN PPPOMN tahun 2021	76
Tabel 32. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal tahun 2020 dan tahun 2021.....	77
Tabel 33. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021	79
Tabel 34. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021	81
Tabel 35. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis	84
Tabel 36. Capaian Kegiatan Per Indikator	86
Tabel 37. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output.....	88
Tabel 38. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN	13
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan	15
Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	15
Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024	17
Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI	19
Gambar 9. Peta Strategi Level 2 PPPOMN	19
Gambar 10. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi	57
Gambar 11. Perbandingan Capaian Indikator Indeks RB antar Unit Kerja di Pusat	68
Gambar 12. Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP antar Unit Kerja di Pusat	71
Gambar 13. Perbandingan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN antar Unit Kerja di Pusat	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	76
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	78
Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	79
Lampiran 4. Surat perubahan target IKM	80
Lampiran 5. Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2020 Tahap IV	94

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon II di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja PPPOMN tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas PPPOMN dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta transparansi penggunaan anggarannya, mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, PPPOMN berkontribusi dalam mendukung Sasaran Strategis BPOM, melalui pencapaian 11 (sebelas) Sasaran Strategis PPPOMN dan 17 indikator kinerja yang disusun berdasarkan Peta Strategi *Balance Score Card* dengan 3 level perspektif yaitu: **1) Stakeholder Perspective**, **2) Internal Process Perspective**, **3) Learning & Growth Perspective** dengan rincian sebagai berikut:

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja
Stakeholder	Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Nilai pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian
		2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium BPOM
	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN
Internal Process	Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium
	Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan
		2. Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan
	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar

<i>Learning & Growth</i>	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN
	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif
	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN
		2. Nilai AKIP PPPOMN
	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN
	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal
	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja serta membiayai kegiatan lainnya PPPOMN memperoleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp105.370.538.000,- (seratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan.

Pada TW III terdapat pemotongan anggaran APBN IV yang cukup besar yaitu sebesar Rp 16.364.419.000, 00 (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu rupiah) sehingga dilakukan penyesuaian target di beberapa output karena adanya perubahan anggaran pada 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP; 2) Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan; 3) Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar; dan 4) Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif. Selain itu, menindaklanjuti adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggungjawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut.

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- b. pelaksanaan pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- c. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka jejaring eksternal BPOM di lingkup nasional dan internasional;
- d. pelaksanaan uji profesiensi dalam lingkup nasional dan internasional;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sumber daya pengujian di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan dan air, serta pengembangan baku pembanding;
- g. pelaksanaan administrasi pusat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Penjabaran Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2. 12.20.1149 Tahun 2020 Tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu Pengelompokan uraian fungsi PPPOMN terdiri atas:

- 1) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat dan bahan obat; dan
 - b) Subkelompok substansi narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.
- 2) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi kosmetik.
- 3) Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia pangan olahan dan air, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mutu dan gizi; dan
 - b) Subkelompok substansi cemaran, residu, dan bahan berbahaya.
- 4) Kelompok substansi pengembangan pengujian mikrobiologi dan biologi molekuler, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat dan suplemen kesehatan; dan
 - b) Subkelompok substansi mikrobiologi dan biologi molekuler obat tradisional, kosmetik, dan pangan.
- 5) Kelompok substansi pengembangan baku pembandingan, terdiri atas:
 - a) Subkelompok substansi baku pembandingan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan obat tradisional; dan
 - b) Subkelompok substansi baku pembandingan suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan.

Secara umum, masing-masing Kelompok substansi dikoordinir oleh Koordinator jabatan fungsional. Koordinator tersebut melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan PPPOMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN, yaitu:

Balai Pengujian Produk Biologi

mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang Produk Biologi

Balai Kalibrasi

mempunyai tugas melaksanakan Kalibrasi alat ukur laboratorium pengujian Obat dan Makanan

Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan

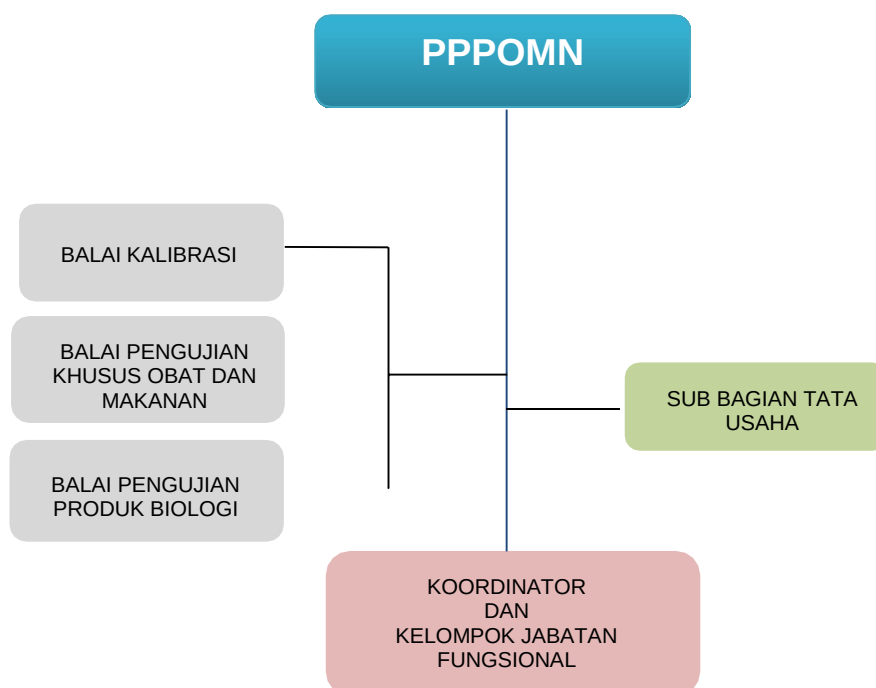
mempunyai tugas melaksanakan Pengujian Khusus Obat dan Makanan.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (eselon 2), Susunan organisasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM, bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya PPPOMN juga membawahi 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Struktur organisasi PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 1. Sebagai berikut:



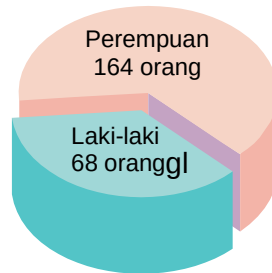
Gambar 1. Struktur Organisasi PPPOMN
Sumber: Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020

1.2.1. Sumber Daya

1.2.1.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPPOMN sampai akhir Desember 2021 didukung oleh 167 orang PNS dan dibantu pramubakti sebanyak 65 orang. Profil pegawai berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan, tingkat pendidikan dan umur dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

a. Berdasarkan jenis kelamin:



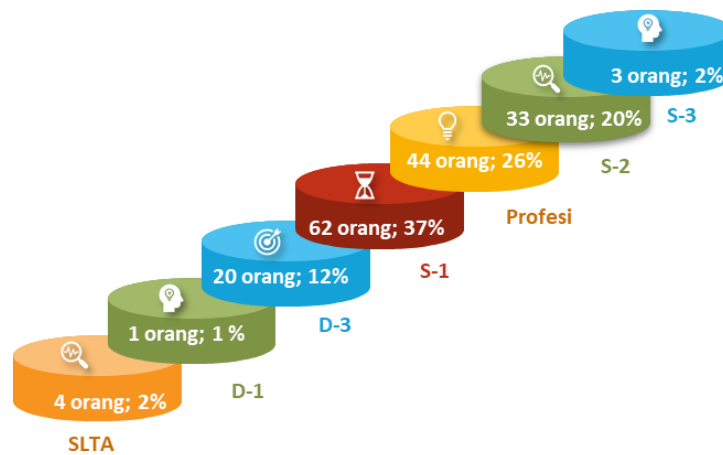
Gambar 2. Profil Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Berdasarkan golongan:



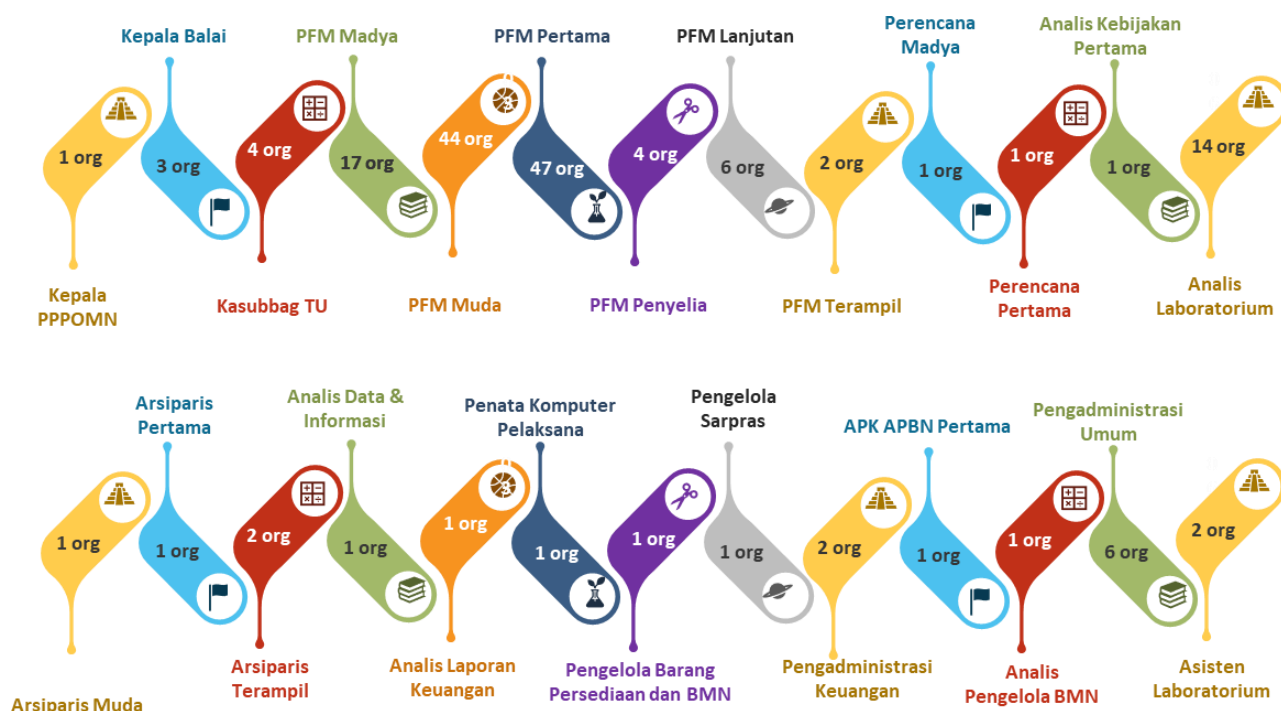
Gambar 3. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan

c. Berdasarkan tingkat pendidikan



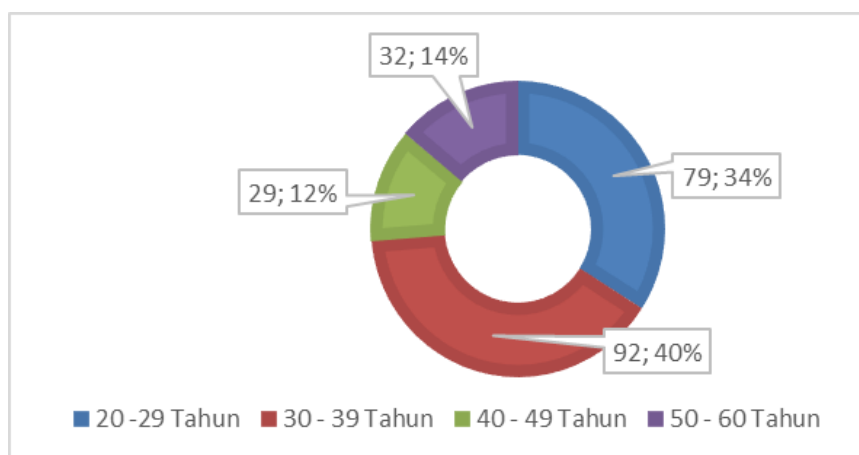
Gambar 4. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan

d. Berdasarkan jabatan:



Gambar 5. Profil Pegawai Berdasarkan Jabatan

e. Berdasarkan kelompok umur:



Gambar 6. Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

1.2.1.2. Anggaran

Pada tahun 2021 PPPOMN memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp105.370.538.000,- (seratus lima milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dalam kegiatan pengembangan pengujian Obat dan Makanan. Adanya pemotongan anggaran sesuai APBN IV, anggaran PPPOMN mengalami pemotongan sebesar Rp16.364.419.000,- (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribuan rupiah) sehingga menjadi Rp. 89.006.119.000,- (Delapan Puluh Sembilan Milyar Enam Juta Seratus Sembilan Belas Ribuan Rupiah).



1.3 Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPPOMN sebagai berikut:

- Belum adanya dokumen *grand design* laboratorium BPOM sebagai landasan untuk penguatan laboratorium BPOM.
- Perlunya pengawalan dalam rangka peningkatan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.
- Masih terdapat kesenjangan kapasitas dan kompetensi laboratorium pengujian Obat dan Makanan, sehingga perlu peran PPPOMN yang lebih optimal.
- Terjadi perubahan kebutuhan peralatan laboratorium karena perubahan nomenklatur organisasi dan penyesuaian dengan system regionalisasi laboratorium.
- Adanya redistribusi pegawai yang berakibat pada penyesuaian kembali pembagian tugas dan beban kerja personel.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi dan Tujuan

Visi PPPOMN sejalan dengan Visi BPOM. Visi, Misi, dan Tujuan BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7. Visi, Misi dan Tujuan BPOM 2020-2024

Misi PPPOMN sebagai berikut:

1. Memperkuat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang andal dan kredibel guna perlindungan bagi segenap bangsa

Hasil pengujian yang valid merupakan bukti ilmiah yang akurat bagi BPOM untuk melakukan tindak lanjut Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Selain itu hasil pengujian juga harus cepat agar tindak lanjut segera dilakukan, sehingga memberikan perlindungan dan rasa aman bagi segenap bangsa dan seluruh warga. Bertambahnya jenis dan volume Obat dan Makanan, inovasi produk, berbagai bahan berbahaya dan cemaran pada kosmetik dan pangan, berbagai bahan kimia obat pada obat tradisional, tren produk bioteknologi/biosimilar, *stem cell*, nanoteknologi merupakan tantangan pengujian laboratorium BPOM. Oleh karena itu PPPOMN terus berupaya meningkatkan kemampuan laboratorium BPOM, baik melalui pelatihan, melengkapi instrumen teknologi tinggi dan



pengembangan fasilitas laboratorium. Hal ini ditunjukkan pada April 2020 PPPOMN telah membangun laboratorium *biohazard* untuk pengujian sampel Covid-19. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala dalam peningkatan kapasitas laboratorium BPOM. Untuk itu, perlu adanya perbaikan konsep pengembangan laboratorium BPOM yang lebih efektif dan efisien melalui Regionalisasi Laboratorium. Sesuai Visi Presiden, maka BPOM perlu meningkatkan peran serta dalam mengembangkan kompetensi pengujian laboratorium Obat dan Makanan di luar BPOM (eksternal) melalui pelatihan dan mendorong partisipasi dalam uji profisiensi/uji kolaborasi, dalam wadah Jejaring Laboratorium. Diharapkan melalui Jejaring Laboratorium Obat dan Makanan, laboratorium di luar BPOM dapat turut serta mendukung dalam menjamin keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia.

2. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang pengujian

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya merupakan semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang diterapkan oleh pemerintah di setiap kementerian dan lembaga untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya RB secara menyeluruh sesuai dengan *Roadmap* RB Nasional 2020-2024. PPPOMN, sebagai salah satu unit BPOM yang memberikan 7 (tujuh) layanan publik berupa layanan pengujian dan layanan lain terkait pengujian, harus terus meningkatkan kualitas layanannya melalui penerapan reformasi birokrasi. Komitmen penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas PPPOMN telah dibuktikan dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, dan akan terus ditingkatkan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

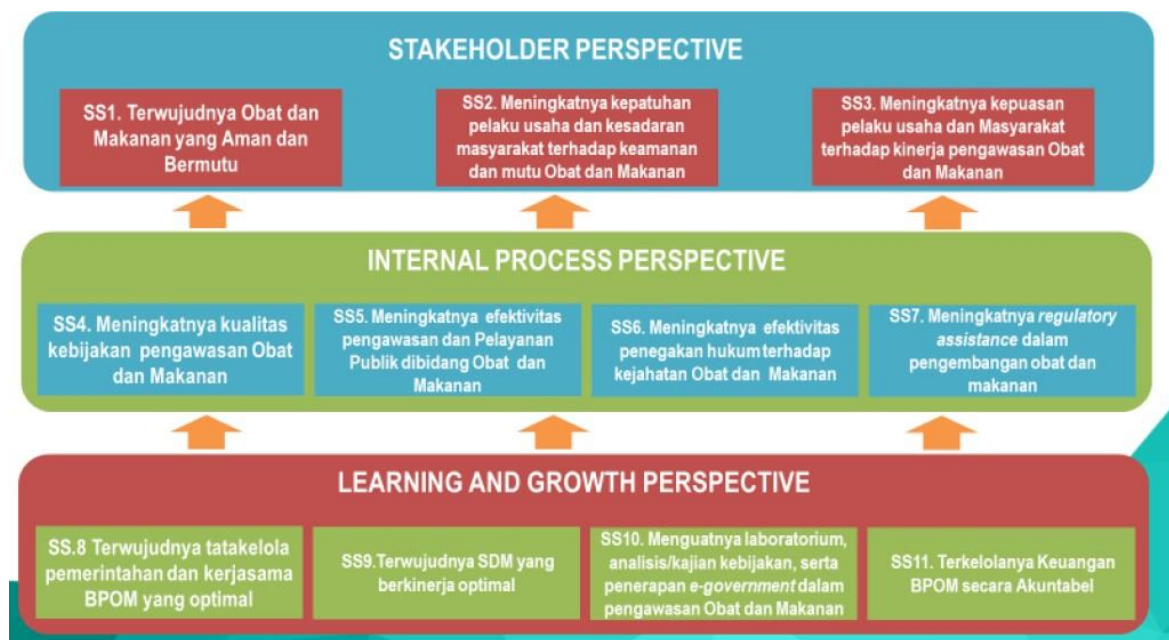
Tujuan

Tujuan PPPOMN dalam mencapai visi dan menjalankan misi PPPOMN yaitu:

1. Meningkatnya kualitas SDM dan kapabilitas laboratorium pengujian Obat dan Makanan menuju standar Internasional;
2. Terwujudnya PPPOMN yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan layanan publik yang prima.

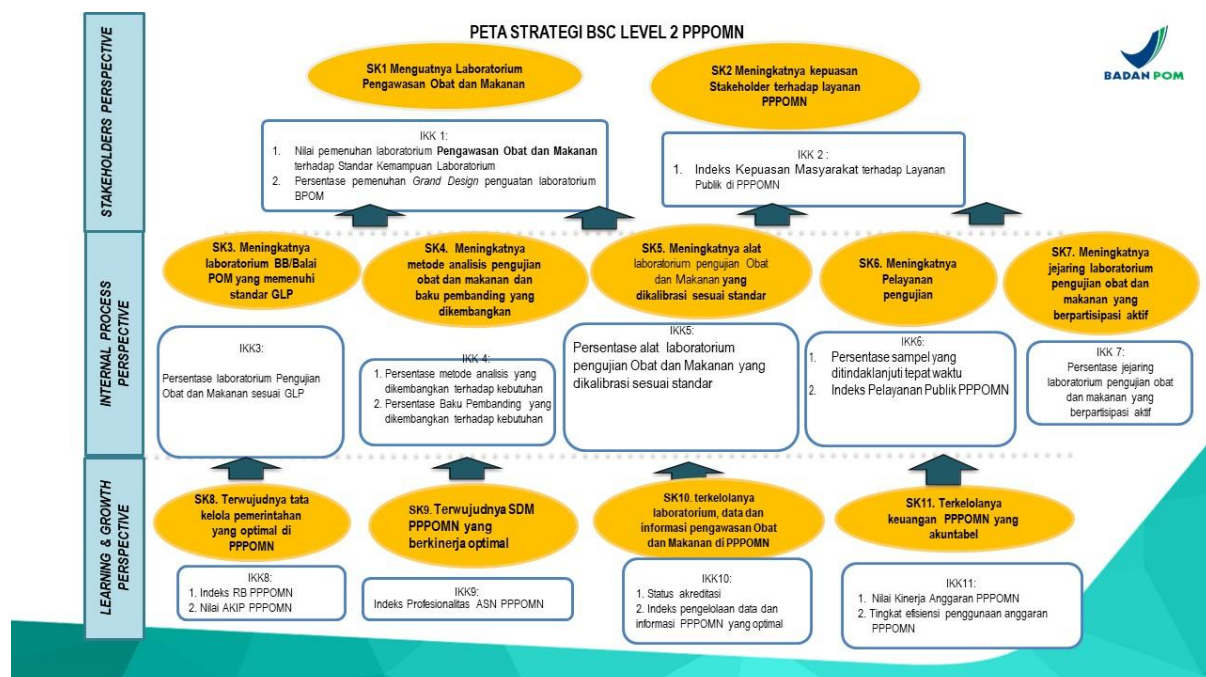
2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:



Gambar 8. Peta Strategi Level 0 BPOM RI
Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Sasaran strategis PPPOMN 2020-2024 disusun berdasarkan peta strategi *balance score card* 3 level perspektif, dengan menurunkan sasaran strategis BPOM perspektif *learning and growth* dan indikatornya ke dalam *stakeholder perspective* peta strategi PPPOMN. Dengan sasaran strategis ini maka PPPOMN akan berkontribusi pada pengawasan Obat dan Makanan. Peta Strategi Level 2 Satker PPPOMN dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Peta Strategi Level 2 PPPOMN
Sumber: Renstra PPPOMN 2020-2024

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 2 PPPOMN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	
PERSPEKTIF STAKEHOLDER			
SS 1	Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 1.1	Nilai persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium
		IKSS 1.2	Persentase pemenuhan <i>Grand Design</i> penguatan laboratorium BPOM
SS 2	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan PPPOMN	IKSS 2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS			
SS 3	Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	IKSS 3	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium*
SS 4	Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	IKSS 4.1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan
		IKSS 4.2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan
SS 5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	IKSS 5	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar
SS 6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	IKSS 6.1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu
		IKSS 6.2	Indeks pelayanan publik PPPOMN
SS 7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	IKSS 7	Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif
PERSPEKTIF LEARNING AND GROWTH			
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	IKSS 8.1	Indeks RB PPPOMN
		IKSS 8.2	Nilai AKIP PPPOMN
SS 9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	IKSS 9	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN
SS 10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	IKSS 10.1	Status akreditasi
		IKSS 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal
SS 11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	IKSS 11.1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN
		IKSS 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN

* Indikator Kinerja pada Renstra BPOM 2020-2024 dalam hal Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan.

1. **Stakeholder Perspective:**

a. **Sasaran Strategis-1:** Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

Menguatnya laboratorium di lingkungan BPOM merupakan kekuatan pengawasan Obat dan Makanan terkait pengawasan *postmarket*. Hasil pengujian laboratorium yang valid berperan penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengonsumsi Obat dan Makanan yang beredar serta dapat digunakan sebagai bukti ilmiah dalam tindak lanjut Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat dan penindakan terhadap pelanggaran. BPOM memiliki laboratorium yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pusat (PPOMN) maupun di daerah (Balai Besar/Balai POM). Seluruh laboratorium BPOM harus dapat mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang sangat dinamis, sehingga laboratorium harus terus diperkuat menyesuaikan perkembangan lingkungan strategis dan perkembangan ilmu dan teknologi. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) tahun 2020-2024 telah disusun, yang dijadikan acuan dalam merencanakan dan mengevaluasi peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

Dalam rangka memperkuat laboratorium dibutuhkan panduan untuk mengarahkan rencana penguatan laboratorium BPOM di masa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, apa yang harus dikembangkan dan strategi yang harus dilakukan serta target setiap tahunnya. Untuk itu perlu dibuat *grand design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. *Grand design* disusun dengan memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Nilai persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 91% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium BPOM dengan target 40% pada akhir tahun 2024.

Persentase pemenuhan *grand design* penguatan laboratorium BPOM akan diukur setelah penyusunan dokumen *grand design* pada tahun 2021.

b. **Sasaran Strategis-2:** Meningkatnya kepuasan *stakeholder* terhadap layanan PPOMN.

PPOMN sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik berkontribusi secara langsung dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Saat ini terdapat 7 (tujuh) jenis layanan publik PPOMN sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu penyediaan baku pembanding kimia, penyediaan baku mikroba, penyediaan hewan uji, layanan uji profisiensi, layanan kalibrasi alat, layanan pengujian dan layanan pelatihan.

Dalam hal pelayanan publik, PPPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri Obat dan Makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan *stakeholder* eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPPOMN. Bahkan pada masa pandemi Covid-19, PPPOMN melakukan pengujian sampel spesimen Covid-19 dari berbagai pihak.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)-nya adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN dengan target 93 pada akhir tahun 2024.

2. Internal Process Perspective:

- a. Sasaran Strategis-3:** Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP.

PPPOMN sebagai NCL (*National Control Laboratory*) selain mengembangkan pengujian juga membina laboratorium pengujian di lingkungan BPOM dalam hal ini BB/BPOM dan Loka POM yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. PPPOMN bertanggung jawab terhadap kemampuan (kualitas dan kapasitas pengujian) laboratorium di lingkungan BPOM agar sesuai dengan standar cara berlaboratorium yang baik atau dikenal dengan *Good Laboratory Practices* dan tuntutan pengawasan. Terlebih lagi BPOM telah berkomitmen untuk mempertahankan pengakuan akreditasi ISO/IEC 17025:2017 dari KAN-BSN (Komite Akreditasi Nasional – Badan Standardisasi Nasional). Oleh karena itu, PPPOMN melakukan peningkatan kompetensi pengujian, mengkaji instrumen analisis, dan mendorong peningkatan ruang lingkup pengujian bagi laboratorium pengujian di lingkungan BPOM. Untuk mengetahui kemampuan laboratorium, perlu dilakukan asesmen pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium berkesinambungan dan dievaluasi menggunakan *tools* yang disusun PPPOMN dengan memperhatikan peningkatan kompetensi, ruang lingkup pengujian, dan ketersediaan alat laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini menggunakan IKSS Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 90% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan.

Salah satu tugas dalam pengembangan pengujian PPPOMN yaitu meningkatkan ketersediaan metode analisis (MA) dan baku pembanding yang dibutuhkan oleh laboratorium BPOM dalam pengujian Obat dan Makanan. Jenis produk berkembang sangat pesat, sangat banyak bahan dilarang dalam kosmetik sesuai *ASEAN Cosmetic Directive*, beragamnya bahan kimia obat dalam obat tradisional, banyaknya cemaran dalam pangan sehingga MA dan jenis baku pembanding perlu terus dikembangkan. Bahkan MA yang dikembangkan beberapa tahun lalu dapat diperbaharui/diganti sesuai perkembangan teknologi. Upaya pengembangan MA dengan membuat roadmap 5 tahun dan perencanaan satu tahun bersama kedeputian atau berdasarkan prioritas terhadap produk yang memberikan dampak negatif terhadap keamanan bagi masyarakat atau kebutuhan pengawasan. Untuk mempercepat pengembangan dan ketahanan MA, perlu diupayakan peran serta laboratorium eksternal. Untuk mempercepat pengembangan baku pembanding dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan industri farmasi. Pengembangan MA dan baku pembanding dilakukan melalui proses validasi maupun verifikasi dan disempurnakan melalui pembahasan bersama tenaga ahli, kemudian dibahas dalam sidang pleno yang terdiri dari beberapa narasumber.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100% pada akhir tahun 2024;
2. Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-5: Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar.

Laboratorium BPOM mempunyai kuantitas alat laboratorium yang sangat banyak dan tercatat sebagai BMN (Barang Milik Negara) di PPPOMN maupun tersebar di 33 BB/BPOM dan 1 Loka POM. Alat laboratorium yang digunakan dalam pengembangan metode analisis dan pengujian harus dikalibrasi dan dipelihara. Hal ini agar hasil pengujian valid, dapat dipercaya dan sesuai persyaratan ISO-IEC 17025:2017 bahwa peralatan yang digunakan untuk pengujian harus tertelusur nilai benarnya ke satuan internasional.

Dengan berkembangnya metode analisis, meningkatnya cakupan pengujian/ jumlah sampel, tuntutan kebenaran akurasi dari alat, maka jumlah alat diperkirakan terus bertambah setiap tahun. Pada tahun 2024, BPOM diperkirakan mempunyai alat laboratorium sebanyak 3528 yang harus dikalibrasi untuk menjaga *performance* alat

sehingga memberikan hasil pengujian yang valid. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatannya adalah Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-6: Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan.

Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di BPOM sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi (tusi) utama PPPOMN yang semula berorientasi pada pengujian berubah menjadi pengembangan pengujian. Namun, PPPOMN melakukan pengujian obat dalam rangka implementasi PQ WHO. Tusi pengujian level Top *referral* dijalankan oleh Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan dan Balai Pengujian Produk Biologi sesuai Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM.

Pelayanan pengujian Obat dan Makanan meliputi sampel rutin produk biologi, sampel khusus (sampel dari Kedeputian Penindakan; sampel permintaan uji konfirmasi dari Kedeputian I, II dan III, sampel pihak ketiga/kepolisian/kejaksaan), sampel rokok dan sampel obat dalam rangka PQ WHO. Hasil pengujian sampel tersebut digunakan dalam tindak lanjut pengawasan terhadap Obat dan Makanan tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk biologi dan melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, sehingga pemenuhan *timeline* pengujian sangatlah penting.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan (IKSS):

1. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 95% pada akhir tahun 2024;
2. Indeks pelayanan publik PPPOMN dengan target 4,51 pada akhir tahun 2024.

e. Sasaran Strategis-7: Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif.

Jejaring laboratorium adalah wadah kerjasama laboratorium pengujian seluruh Indonesia (BPOM dan eksternal BPOM) yang menyelenggarakan program peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium yang meliputi Uji Profisiensi/ kolaborasi/ pelatihan/ workshop/ *meeting*/FGD yang diselenggarakan PPPOMN dengan melibatkan laboratorium lintas sektor sesuai lingkup pengujian/keahlian. Laboratorium di Indonesia cukup banyak untuk itu perlu diberdayakan dalam pengujian Obat dan Makanan, sehingga membantu pelaku usaha dalam melakukan pengujian. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan peran serta laboratorium dan menghindari *dispute* hasil pengujian. Total jejaring laboratorium

sesuai lingkup pengujian/ keahlian pada periode renstra PPPOMN 2020-2024 adalah 14 jejaring. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatan (IKSS) nya adalah Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif dengan target 100% pada akhir tahun 2024.

3. **Learning and Growth Perspective:**

a. **Sasaran Strategis-8:** Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN.

Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, BPOM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi RB melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM. Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada bulan Oktober telah dilakukan Reviu Renstra BPOM yaitu mereviu semua sasaran strategis dan indikator berikut target yang ada di Peta strategi Level nol (BPOM) sehingga terjadi penyesuaian target terutama pada taget *Learning Growth LG* nya, termasuk target indeks RB untuk PPPOMN pada tahun 2021 ada penyesuaian dari target semula 91 menjadi 86,6

Berdasarkan evaluasi Inspektorat Utama terhadap akuntabilitas kinerja, nilai akuntabilitas PPPOMN pada tahun 2021 adalah 80,22 atau predikat A. Hal ini menunjukkan bahwa PPPOMN telah memiliki akuntabilitas kinerja baik, serta telah memiliki manajemen kinerja yang andal. Hasil yang diperoleh perlu dipertahankan dan dilakukan peningkatan dalam periode-periode berikutnya, sehingga diperoleh nilai dan predikat yang lebih baik.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan: Indeks RB PPPOMN dengan target nilai 89,6 pada akhir tahun 2024 dan Nilai AKIP PPPOMN dengan target nilai 92 pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran Strategis-9: Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal.

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu SDM perlu diberikan pelatihan agar kompeten dan dievaluasi untuk ditingkatkan kinerjanya. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas/pekerjaan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja kegiatan adalah Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN dengan target nilai 87,00 pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis-10: Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN.

Setelah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015, PPPOMN perlu juga menerapkan sistem mutu untuk provider uji profisiensi dan produsen bahan acuan mengacu standar ISO/IEC 17043 dan ISO/IEC 17034. Sebagai provider uji profisiensi, PPPOMN telah menyelenggarakan uji profisiensi pengujian kimia, mikrobiologi dan biologi molekuler untuk produk Obat, NAPPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan. Untuk itu PPPOMN berupaya mendapatkan akreditasi kedua standar ISO tersebut secara bertahap dalam kurun waktu 2020-2024.

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi satu pintu sehingga tidak ada perbedaan data yang keluar dari BPOM dan memudahkan pimpinan dalam memantau kinerja setiap unit kerja serta mempercepat pelaporan kinerja BPOM, maka telah dibuat sistem data dan informasi terintegrasi yaitu BPOM *Operating Center (BOC)*. Setiap Unit kerja melaporkan data dan informasi ke dalam sistem informasi yang digunakan sehingga dapat ditampilkan pada BOC. Penilaian indikator dikategorikan baik apabila data dan informasi yang dilaporkan sesuai yang ditargetkan dan sistem informasi (layanan TIK) yang dibuat telah dimanfaatkan.

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Status akreditasi dengan target akreditasi PPPOMN sebagai produsen bahan acuan (ISO/IEC 17034) dan provider uji profisiensi (ISO/IEC 17043).
2. Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal dengan target nilai 3 (tiga) pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel.

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabel dalam penggunaannya. Untuk itu, salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* harus menggambarkan kemampuan



PPPOMN dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja kegiatan:

1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN dengan target nilai 96,25 pada akhir tahun 2024
2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN dengan target 93% (efisien) pada akhir tahun 2024.

Tabel 2. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Strategis dan IKSS di Pusat Pengembangan pengujian Obat dan Makanan Nasional Sesuai Renstra PPOMN 2020-2024

Sasaran Strategis		Target (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan						
1	Nilai pemenuhan laboratorium BPOM terhadap standar kemampuan laboratorium	71	76	81	86	91
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	-	5	20	30	40
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN						
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	84.5	90	91	92	93
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP						
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar kemampuan laboratorium	70	75	80	85	90
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan						
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	65	74	82	91	100
2	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	70	76,56	85	92	100
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar						
1	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	79	82	89	92	100
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan						
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	92	93	94	95
2	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	4,20	4,30	4,40	4,51
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif						
1	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	43	50	71	86	100

Sasaran Strategis 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN						
1	Indeks RB PPPOMN	91	86,6	87,6	88,6	89,6
2	Nilai AKIP PPPOMN	80	77,2	78,7	80,2	81,7
Sasaran Strategis 9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal						
1	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	86	86,25	86,50	87,00
Sasaran Strategis 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN						
1	Status akreditasi	-	-	20	60	100
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	1,51	2,00	2,25	2,50	3,00
Sasaran Strategis 11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel						
1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	93,4	93,5	94,1	95,3	96,0
2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kewajiban setiap Kementerian/Lembaga sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melakukan program/kegiatan. PK merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan *monitoring* pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. PK disusun berdasarkan kesepakatan antara pengembalian tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan

yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2021 terjadi realokasi dan refocusing belanja APBNP-IV sehingga anggaran PPPOMN mengalami pemotongan sebesar Rp16.364.419.000,- (Enam belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu rupiah) dan perlu dilakukan penyesuaian target untuk beberapa indikator kinerja yaitu Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan, Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar, dan Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif.

Selain itu, menindaklanjuti adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggung jawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut. Surat terkait penyesuaian target indikator tersebut sebagaimana pada lampiran 4.

Perjanjian Kinerja eselon II dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 PPPOMN

Perspektif	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Stakeholder	1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	1. Nilai pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian	76
		2. Persentase Pemenuhan <i>Grand Design</i> (GD) penguatan laboratorium BPOM	5
	2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	90
Internal Process	3. Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP/SKL	75
	4. Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	1.Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74
		2.Persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,56
	5.Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	82

<i>Learning & Growth</i>	6.Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1.Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92
		2.Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,20
	7.Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	50
	8.Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	86,6
		2. Nilai AKIP PPPOMN	77,2
	9.Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86
	10.Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00
	11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,50
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91 %)

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja PPPOMN tahun 2021 disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi kegiatan dalam tahun 2021. PPPOMN telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator kinerja. Pencapaian kesebelas sasaran strategis PPPOMN tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2021

Sasaran Strategis Indikator		Capaian				Kriteria
		Target	Satuan	Realisasi	Capaian	
Sasaran Strategis 1. Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan						
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	%	76,77	101,01	Baik
2	Persentase pemenuhan <i>grand design</i> penguatan laboratorium BPOM	5	%	5	100	Baik
Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN						
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	90	nilai	92,66	102,96	Baik
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP						
1	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	%	87,88	117,17	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4. Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan						
1	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	%	75,18	101,60	Baik
2	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	76,56	%	76,82	100,34	Baik
Sasaran Strategis 5. Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar						

1	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	82	%	76,02	92,71	Baik
Sasaran Strategis 6. Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan						
1	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	%	96,75	105,16	Baik
2	Indeks pelayanan publik PPPOMN	4,20	Nilai	4,34	103,33	Baik
Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif						
1	Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	50	%	50	100	Baik
Sasaran Strategis 8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN						
1	Indeks RB PPPOMN	86,6	Nilai	86,56	99,95	Baik
2	Nilai AKIP PPPOMN	77,2	Nilai	80,22	103,91	Baik
Sasaran Strategis 9. Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal						
1	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86	Nilai	85,02	98,86	Baik
Sasaran Strategis 10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN						
1	Status akreditasi	-	-	Tahun 2022	Tahun 2022	
2	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,00	Nilai	1,75	87,5	Cukup
Sasaran Strategis 11. Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel						
1	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	93.5	%	92,3	98,71	Baik
2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)	%	100	109,89	Baik

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sampai dengan Desember 2021 (TW IV) tidak dilakukan penilaian karena indikator kinerja status akreditasi baru akan dilakukan penilaian pada tahun 2022.

Sasaran Strategis 1:
Menguatnya Laboratorium Pengawasan
Obat dan Makanan

IKSS 1.1 Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian

Dalam rangka penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan, pada tahun 2020 diterbitkan Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM berupa Keputusan Kepala Badan POM POM No. HK.02.01.1.2.11.20.1114 Tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku untuk tahun 2020 sampai 2024 dan telah dilakukan penerapannya di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN. Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Sebagai upaya tindak lanjut pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium, maka pada tahun 2021 disusun *road map* pemenuhan untuk 3 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi dan Standar Peralatan tahun 2021-2024. PPPOMN melakukan evaluasi terhadap *Road map* yang diusulkan Balai Besar/Balai POM. Hasil evaluasi disampaikan ke Balai Besar/Balai POM melalui pembahasan secara daring. PPPOMN juga berkontribusi dalam tercapainya pemenuhan *roadmap* tersebut, antara lain melakukan pembinaan ke Balai Besar/Balai POM melalui pelatihan dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian, peningkatan kompetensi Balai Besar/Balai POM, menyelenggarakan Uji Profisiensi/Kolaborasi sesuai parameter ruang lingkup pengujian sehingga diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan nilai pemenuhannya.

Terkait pemenuhan peralatan, PPPOMN memberikan rekomendasi peralatan Balai Besar/Balai POM sesuai standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup di Balai Besar/Balai POM, PPPOMN memberikan masukan ke Kedeputian untuk parameter uji yang belum masuk di Pedoman Sampling.

Cara perhitungan persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian adalah jumlah rata-rata nilai pemenuhan SKL PPPOMN dan rata-rata nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM. Nilai pemenuhan SKL PPPOMN dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing laboratorium (Obat, NAPPZA, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Baku Pembanding, Mikrobiologi dan Biologi Molekuler, dan Produk Biologi). Nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dihitung dari rata-rata nilai pencapaian pemenuhan SRL, standar peralatan dan standar kompetensi masing-masing Balai.

Pada tahun 2021 target indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium adalah 76%, dengan target Nilai SKL PPPOMN adalah 77% dan target Nilai SKL Balai Besar/Balai POM adalah 75%.

Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian dilakukan mulai TW I melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL di Balai Besar/Balai POM dan PPPOMN dilakukan pada akhir tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL PPPOMN dan Balai Besar/Balai POM dilakukan setiap triwulan berdasarkan *roadmap* yang sudah ditetapkan dan disepakati. Dengan dilakukan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2021 yaitu 76%.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian adalah 76,77% yang terdiri dari realisasi nilai pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sebesar 74,1%, dan realisasi nilai SKL PPPOMN sebesar 79,4%. Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja tahun 2021, maka capaian indikator kinerja ini adalah 101,01%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 5. Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan laboratorium/pengujian tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan						
Nilai Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	71	72,6	102,25	76	76,77	101,01

Capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Penurunan capaian SK 1 ini antara lain disebabkan karena adanya perubahan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang menyebabkan mutasi/rotasi pegawai yang berdampak pada pemenuhan standar kompetensi laboratorium. Selain itu, adanya refocusing anggaran sebagai

dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pemotongan anggaran belanja pembelian/pengadaan peralatan laboratorium.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

- PPPOMN sebagai unit pembina teknis laboratorium BPOM melakukan penilaian terhadap Standar Kemampuan Laboratorium BPOM tahun 2021. Beberapa kendala dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:
 - ❖ Adanya mutasi/ perpindahan staf pengujian ke fungsi lain internal maupun eksternal pengujian tanpa adanya sharing knowledge maupun informasi.
 - ❖ Standar peralatan laboratorium di Balai POM belum terpenuhi dikarenakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan tahun 2022:

- Perlu dilakukan pendampingan dan monitoring pemenuhan SKL Balai POM secara intensif terutama untuk Balai POM yang masih belum memenuhi target SKL seperti Balai POM di Sofifi, Mamuju, Manokwari dan Jambi mulai dari penyusunan roadmap, pelaksanaan, evaluasi, rekomendasi, dan intervensi jika diperlukan.
- Pada tahun 2022 dilaksanakan implementasi regionalisasi laboratorium, dengan adanya perubahan kebijakan tersebut perlu ada penyesuaian target SKL berdasarkan konsep regionalisasi laboratorium.
- Membentuk tim pendamping pemenuhan SKL sesuai dengan konsep regionalisasi laboratorium.

IKSS 1.2 Persentase pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM

Penyusunan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM merupakan strategi dalam rangka memperkuat laboratorium. *Grand Design* (GD) memuat strategi penguatan, program prioritas dan indikator penguatan laboratorium sejalan dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan BPOM.

Target pemenuhan *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM tahun 2021 adalah sebesar 5% yang berupa dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium BPOM, yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan *Grand Design* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, pencapaian target indikator kinerja ini diukur pada akhir tahun atau TW IV. Tahapan kegiatan penyusunan dokumen *Grand Design* telah dilakukan yaitu penyusunan dokumen *Grand Design* secara swakelola oleh Tim *Grand Design* penguatan laboratorium Badan POM dengan mengundang narasumber terkait. Penyusunan dokumen secara swakelola dilakukan karena adanya kegagalan lelang pengadaan jasa konsultan penyusunan



dokumen Grand Design. Pada Bulan September sudah dilakukan pengisian kuesioner dengan Responden dari laboratorium internal (Balai Besar/Balai POM) dan Laboratorium Eksternal (Perguruan tinggi, Laboratorium Swasta dan Laboratorium Kementerian/lembaga). Data hasil survei dianalisis untuk penyusunan dokumen Grand Design dengan melibatkan narasumber. Analisis SWOT telah dilakukan untuk memetakan kondisi saat ini serta proyeksi sampai dengan tahun 2045. Sosialisasi kerangka Grand Design penguatan laboratorium kepada unit kerja internal dan Balai Besar/Balai POM telah dilaksanakan pada 06 Desember 2021. Selain itu juga telah didiskusikan rencana pembuatan road map beserta penerapannya pada tahun 2022 dan integrasi regionalisasi laboratorium dengan Grand Design Penguatan Laboratorium BPOM.

Capaian indikator kinerja ini sebesar 100% yaitu berupa dokumen Grand Design penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Realisasi sebesar 5% yaitu berupa dokumen *Grand Design* penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Capaian indikator kinerja ini adalah 100%. Dokumen *Grand Design* ini dijadikan peta jalan implementasi penguatan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Pada tahun 2020, baru dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja *Grand Design* penguatan laboratorium, dan belum ditargetkan capaian kinerjanya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini karena adanya monitoring dan evaluasi setiap triwulan sehingga pada saat terjadi kendala pengadaan jasa konsultan melalui tender segera dialihkan menjadi kegiatan swakelola. Penyusunan dokumen *Grand Design* dilakukan secara intensif oleh tim dan pakar terkait dengan dukungan data baik dari internal maupun eksternal BPOM.

Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya kepuasan stakeholder
terhadap layanan PPPOMN

IKSS 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPPOMN

Kepuasan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM dan mengacu pada pedoman terkini (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Dalam hal pelayanan publik, PPPOMN telah berkontribusi menunjang kebutuhan baku pembanding kimia, baku mikroba dan hewan uji dalam pengawasan mutu internal di industri Obat dan Makanan maupun pada riset dan pengembangan oleh akademisi dan mahasiswa. Layanan uji profisiensi, kalibrasi alat dan pelatihan terkait teknis laboratorium juga menunjang kegiatan stakeholder eksternal dari lintas K/L maupun dari laboratorium pengujian lain di luar BPOM. Demikian halnya dengan layanan pengujian yang dilakukan oleh PPPOMN. Bahkan pada masa pandemi covid 19, PPPOMN melakukan pengujian sampel spesimen covid 19 dari berbagai pihak.

Capaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN akan dihitung di akhir tahun 2021 dengan target sebesar 90.00. Namun dalam upaya peningkatan pelayanan publik, PPPOMN senantiasa melakukan survei umpan balik pelanggan pengguna layanan. Survei umpan balik dilakukan setelah pelanggan menerima layanan publik dengan membagikan link berbasis *google drive* dengan nama SIKEPO (Sistem Informasi Kepuasan Pelanggan Online) dengan alamat: bit.ly/SurveiPPPOMN. Penilaian atas kualitas pelayanan dan saran serta masukan dari pelanggan menjadi landasan bagi PPPOMN untuk melakukan perbaikan dan inovasi agar selalu memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan survei umpan balik pelanggan pada TW IV Tahun 2021 diperoleh data pelanggan sebanyak 50 pelanggan (sebagai populasi) dari tujuh jenis layanan publik PPPOMN. Pada pengukuran nilai SKM jumlah data yang digunakan sesuai dengan Tabel Krejcie & Morgan yang dapat dilihat pada tabel 6. Nilai SKM tiap layanan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6. Responden SKM Menurut Tabel Krejcie & Morgan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH POPULASI	JUMLAH RESPONDEN MENURUT TABEL KREJCIE & MORGAN
1	Pembelian Baku Pembanding BPFI	6	6
2	Layanan Kalibrasi	15	15
3	Layanan Pengujian	6	6
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	2	2
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	1	1
6	Layanan Uji Profisiensi	20	20
7	Layanan Pelatihan	-	-
Jumlah		50	50

Perolehan nilai SKM pada TW IV Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Nilai SKM Tiap Layanan pada Triwulan IV Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Nilai SKM
1	Pembelian Baku Pembanding BPFI	90,28
2	Layanan Kalibrasi	90,20
3	Layanan Pengujian	90,15
4	Layanan Pembelian Baku Mikroba	82,41
5	Layanan Pembelian Hewan Uji	90,74
6	Layanan Uji Profisiensi	91,02
7	Layanan Pelatihan	-
	Rata-rata	89,13

Kategori Nilai SKM

	Mutu Pelayanan A (Sangat Baik)	: 88,31 – 100,00	(3,54 – 4,00)
	Mutu Pelayanan B (Baik)	: 76,61 – 88,30	(3,07 – 3,53)
	Mutu Pelayanan C (Kurang Baik)	: 65,00 – 76,60	(2,61 – 3,06)
	Mutu Pelayanan D (Tidak Baik)	: 25,00 – 64,99	(1,00 – 2,60)

Nilai SKM tiap jenis layanan yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 50 orang berkisar antara 75 – 100 dengan hasil pelayanan secara umum PUAS. Nilai SKM terendah pada Layanan Pembelian Baku Mikroba dan tertinggi pada Layanan Uji Profisiensi Rata-rata nilai SKM dari enam jenis layanan adalah **89,13** masuk dalam kategori Mutu Pelayanan **A (Sangat Baik)**.

Tabel 8. Nilai SKM Tiap Unsur Layanan pada Triwulan IV Tahun 2021

No	Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Rata-rata
1	Kalibrasi	92,17	92,17	88,83	88,83	92,17	86,67	95,50	88,83	86,67	90,20
2	Pembelian BPF	95,83	100,00	87,50	83,33	83,33	91,67	91,67	91,67	87,50	90,28
3	Pengujian	94,50	91,67	86,17	94,50	86,17	86,17	91,67	88,83	91,67	90,15
4	Uji Profisiensi	90,00	90,00	92,50	91,67	90,83	90,83	92,50	90,83	90,00	91,02
5	Pembelian Baku Mikroba	75,00	75,00	83,33	83,33	91,67	91,67	83,33	83,33	75,00	82,41
6	Pembelian Hewan Uji	100,00	100,00	83,33	83,33	83,33	100,00	100,00	83,33	83,33	90,74
7	Pelatihan	-									
	Total	91,25	91,47	86,94	87,50	87,92	91,17	92,44	87,81	85,69	89,13

Dari tabel diatas terlihat bahwa layanan yang nilainya terendah adalah layanan pembelian baku mikroba (82,41), Sedangkan unsur layanan yang nilainya paling rendah adalah unsur layanan Sarana dan Prasarana (U9). Terkait hal ini perlu dilakukan perbaikan unsur sarana prasarana (U9), persyaratan (U1) dan sistem, mekanisme dan prosedur (U2) khususnya pada layanan baku mikroba untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Tabel 9. Saran dan Masukan Responden Pelayanan Publik pada Triwulan IV Tahun 2021

Jenis Layanan		Saran dan Masukan	
1	Jasa Kalibrasi	1	Sertifikat kalibrasi dapat terbit lebih cepat dan dapat diakses secara digital
		2	Agar bisa menambah ruang lingkup pelayanan kalibrasi
		3	Semoga lebih baik lagi untuk kedepan nya.
		4	Penambahan alat utk tabel evaluasi sertifikat kalibrasi
2	Pembelian Baku Pembanding	1	CoA hendaknya dibuat dengan lebih baik, rapi menggunakan kertas kop
		2	Label hendaknya diperbaiki sehingga tampak lebih profesional, rapi, enak dilihat, dan awet tidak mudah terhapus, bisa merujuk pada label - label reference standard
		3	Sistem pembayarannya sebaiknya dipermudah seperti transfer biasa agar bisa lewat m-banking
		4	Respon cepat dan ramah, untuk baku pembanding ada beberapa item yg tdk tersedia.

3	Pengujian	1	Mohon untuk report khusus pengujian iritasi kulit dan mata diberikan ke pelanggan, tidak hanya berupa hasil ujinya saja
		2	Pelayanan sudah bagus mohon di sustain
		3.	Kami berharap untuk di PPPOMN sering mengadakan sosialisasi, sehingga kami semakin paham apa saja yang bs dilakukan dan mandatory di lakukan testing di PPPOMN
4	Uji Profisiensi	1	Kalau bisa sampel dikirim sakalian dengan petunjuk teknis, kami kadang masih terkendala karena operatornya bukan orang pengujian sehingga kami tidak bisa langsung menerima petunjuk teknis. terima kasih
		2	Semoga pelayanan uji profisiensi melalui infalabs terjaga performanya.
		3	Agar materi uji dan jadwal pelaksanaan disesuaikan dengan kemampuan balai secara umum
		4	Tingkatkan lagi
		5	Dipertahankan kualitas yg sudah diberikan saat ini
		6	Harap pengguna jasa profisiensi diberi resi/ pemberitahuan kalau sampel akan dikirim
		7	Pelayanan tetap dipertahankan dan ditambah inovasi inovasi yg memudahkan pelanggan
		8	Mohon aplikasi Infalabs dipermudah untuk pencarian judul UP, karena UP yg diikuti dari berbagai bidang sehingga harus berkali-kali mencari judul yang diinginkan.
		9	Tetap dibuat survey kebutuhan UP tiap balai.
		10	Pada aplikasi infalabs, dalam pemilihan judul klo bisa langsung d buat judul, tidak hanya kode UP saja, misal untuk kode 525 itu sebenarnya uji profisiensi ALT pada OT, tapi kita tidak langsung tahu itu UP ALT OT. Kecuali kalau dibuka terlebih dahulu, apalagi kalau kita lupa dngan kode nya, jadi harus buka satu per satu kode agar tahu itu judul UP nya apa.
11	Sudah cukup bagus		
5	Pembelian Baku Mikroba	1	Terus ditingkatkan sistem pelayanannya.
		2	Tidak ada saran dan masukan semua sudah terprogram dan jelas
6	Pembelian Hewan Uji	1	Pelayanan sudah bagus dan mudah. Untuk kedepannya kalau bisa dibuat aplikasi untuk smartphome.

Di samping melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri, Inspektorat Utama BPOM melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dijadikan penilaian untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat yang diukur setiap tahun untuk unit penyelenggara layanan publik. Pada tahun 2021, nilai indeks survei kepuasan masyarakat untuk PPPOMN adalah 92,66 (sangat baik).

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat dan monev tindak lanjut SKM oleh inspektorat bulan April 2021 dengan hasil 92,66 (sangat baik). Berdasarkan perhitungan ulang dengan baseline SKM tahun 2020, PPPOMN telah melakukan revisi target Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2021 menjadi 90 melalui Surat No.B-PI.06.08.7.71.04.20.03.

Jumlah Populasi dan Responden Tiap Layanan pada PPPOMN Tahun 2020 dan 2021

No	Jenis Pelayanan	Populasi		Responden menurut Tabel Krejcie & Morgan	
		2020	2021	2020	2021
1	Penjualan Hewan Uji	5	5	5	5
2	Penjualan Baku Pembanding Farmakope Indonesia	10	9	10	9
3	Jasa Pengujian	11	9	11	9
4	Penjualan Baku Pembanding Bakteri	4	2	4	2
5	Jasa Kalibrasi	1	6	1	6
6	Jasa Uji Profisiensi	6	2	6	2
7	Pelatihan	7	4	7	4
Jumlah		44	37	44	37

Nilai SKM Per Jenis Pelayanan & Per Unsur Pelayanan pada PPPOMN Tahun 2021

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Penjualan Hewan Uji	96,67	96,67	92,22	90,00	90,00	93,33	96,67	90,00	90,00	92,84
Penjualan Baku Pembanding FI	94,44	92,59	88,89	94,44	92,59	88,89	90,74	87,04	85,19	90,53
Jasa Pengujian	98,15	98,15	96,91	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	94,44	97,60
Penjualan Baku Pembanding Bakteri	100,00	100,00	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	98,15
Jasa Kalibrasi	91,67	91,67	90,74	94,44	88,89	94,44	94,44	86,11	86,11	90,95
Jasa Uji Profisiensi	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
Pelatihan	91,67	91,67	86,11	87,50	95,83	95,83	91,67	87,50	87,50	90,59

Berikut adalah saran dan masukan dari pelanggan yang disurvei pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenis Pelayanan	Saran/Masukan
Penjualan Hewan Uji	1. Tetap semangat menjalankan tugasnya 2. Pelayanan hewan uji sudah baik, perlu ditingkatkan jumlah hewannya supaya tidak ada antrian 3. Sudah sangat baik, sering difollow up sama unit terkait mengenai pemesanan, petugas sangat ramah mulai dari security, frontdesk, laboran, dan manajer 4. PPPOMN Keren
Penjualan Baku Pembanding FI	1. Untuk pelayanan pembelian baku pembanding kalau bisa ada link ke nomor handphone pembeli bila proses pembelian telah diproses/ditolak. 2. semoga semakin sukses 3. Mohon untuk selalu dicek status sistem pada sipopon karena kmrn saya smp 4 hari tidak muncul kode billingnya sehingga bingung untuk melakukan pembayaran dan waktu orderpun mjd lebih lama mundur dari prediksi 4. Kadar baku pembanding tertera pada vial. 5. Semoga Lab BBP P3OMN semakin maju dalam memproduksi BPFI dan semakin banyak jenis BPFI yang bisa di produksi. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini 6. Ada informasi untuk baku pembanding yang stocknya kosong 7. Sudah baik. 8. Pertahankan dan lebih ditingkatkan 9. Persediaan baku agar lebih lengkap lagi

Jasa Pengujian	1. Semoga ke depannya semakin baik lagi,dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Terima kasih 2. BPOM MANTAPPPP 3. Sangat bagus. Petugas komunikatif, sangat membantu! Terkadang masih mau melayani ketika jam istirahat. Keren pokoknya! Sukses selalu PPPOMN! 4. Semoga P3OMN terus mempertahankan pelayanan terbaik nya. 5. Terima kasih atas kerja samanya dan tetap di pertahankan 6. Kalau boleh Sabtu Minggu nambah terima pengujian swab juga
Penjualan Baku Pembanding Bakteri	1. Disediakan juga biakan murni V. cholerae yang sangat sulit untuk di dapatkan 2. Tetap dipertahankan dengan baik kualitas pelayanan yang sudah diberikan (Puas) 3. Puas 4. Semoga dapat disediakan lebih banyak macam mikroba yg diperlukan (Puas) 5. baku mikroba yang disediakan agar lebih banyak lagi

Jenis Pelayanan	Saran/Masukan
	6. Mohon dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi
Jasa Kalibrasi	1. Pertahankan yg sudah baik ya 2. secara keseluruhan sudah bagus. Masukannya buat PPPOMN adalah meningkatkan lagi metode analisis yang sudah dipersyaratkan dalam standar pengujian produk obat, makanan dan minuman, OT, Kosmetik dan suplemen. Jangan sampai di perkabadan POM dipersyaratkan hasil pengujian ini dan itu tapi lab kita tidak siap karena Metode Analisisnya belum ada 3. Terima kasih 4. Mohon agar penjadwalan kalibrasi untuk semua unit BPOM lebih teratur lagi melalui koordinasi yg baik 5. Semoga ke depan semakin lebih baik lagi
Jasa Uji Profisiensi	1. survei Pelayanan Publik tidak berulang-ulang diisikan pada saat download hasil 2. Evaluasi hasil uji profisiensi mohon dipercepat 3. Ada timeline kapan laporan hasil uji profisiensi selesai 4. Mantap dan terima kasih.
Pelatihan	1. Diadakan lagi pelatihan dengan topik yang berbeda 2. Pertahankan layanan yg telah ada

% Realisasi IKSS = 92,66

% Capaian IKSS = $\frac{92,66}{90} \times 100\% = 102,96\%$

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 10. Perbandingan capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

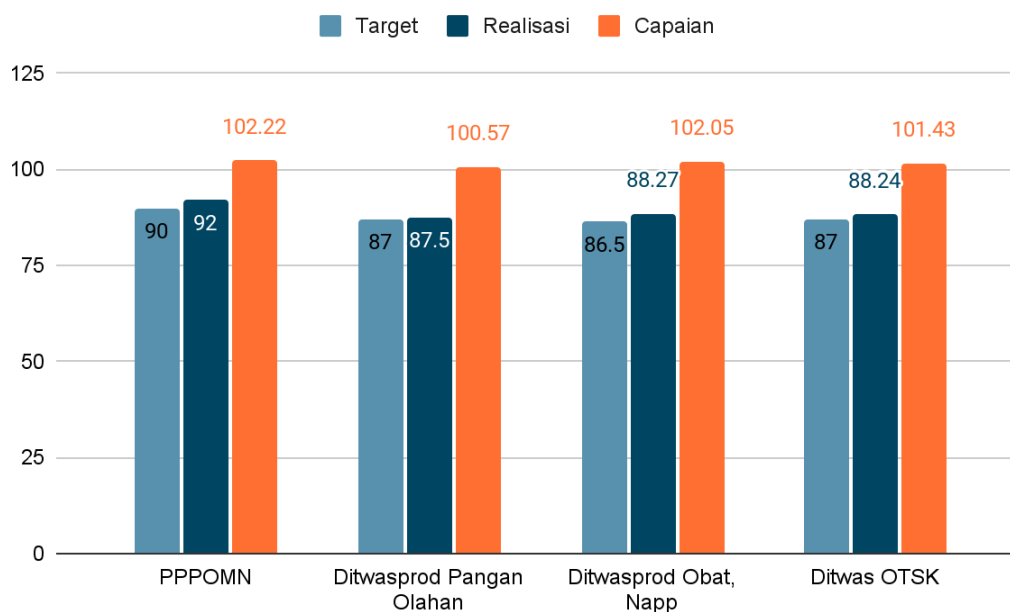
	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan PPPOMN						
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di PPPOMN	84,5	89,51	105,93	90	92,66	102,96

Nilai SKM Per Unsur Pelayanan pada PPPOMN Tahun 2020 dan 2021

Unsur Pelayanan		2020	2021	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	88,64	94,59	5,95
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	89,77	94,14	4,37
U3	Waktu Penyelesaian	88,51	91,14	2,63
U4	Biaya/Tarif	90,91	93,69	2,78
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,15	93,24	3,09
U6	Kompetensi Pelaksana	91,67	93,69	2,02
U7	Perilaku Pelaksana	91,67	94,14	2,47
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	90,15	90,54	0,39
U9	Sarana dan Prasarana	84,09	88,74	4,65
Nilai		89,51	92,66	3,15

Pada bulan April 2021 dilakukan penyesuaian target indikator kinerja ini dari semula 87 menjadi 90 karena realisasi tahun 2020 telah mencapai 89,51. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terjadi penurunan meskipun capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu 102,96%.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja di Pusat Tahun 2021



Jika dibandingkan dengan unit kerja lain di Pusat yang menyelenggarakan pelayanan publik yang setara, capaian PPPOMN relatif lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai SKM Badan POM (89,80), nilai SKM PPPOMN (92,66) masih melebihi nilai rata-rata SKM Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai SKM PPPOMN Tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan dan bahkan melebihi rata-rata nilai SKM Badan POM. Namun tetap perlu dilakukan evaluasi terutama untuk unsur pelayanan yang masih memiliki nilai yang rendah. Unsur Pelayanan yang masih perlu dilakukan peningkatan adalah unsur layanan Sarana dan Prasarana khususnya Layanan Jasa Kalibrasi, Uji Profisiensi, dan Baku Pembanding FI.

Rencana Tindak Lanjut

Pada tahun 2022 akan berupaya meningkatkan layanan publik untuk kepuasan masyarakat dan meningkatkan unsur pelayanan yang masih rendah.

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar GLP

IKSS 3. Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai standar GLP

GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari Cut off ($\geq 70\%$). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024.

Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dilakukan pada akhir tahun. Cara perhitungan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah sebagai berikut:

1. Hitung persentase pemenuhan standar kemampuan laboratorium (rata-rata dari SRL, alat dan kompetensi) untuk masing-masing BB/BPOM
2. Hitung jumlah BB/BPOM yang memenuhi standar kemampuan laboratorium dengan nilai rata-rata $\geq 70\%$ (cut off) menggunakan standar kemampuan laboratorium (2020-2024)
3. Jumlah BB/BPOM yang memiliki nilai pemenuhan terhadap standar kemampuan laboratorium $\geq 70\%$ dibagi jumlah keseluruhan BB/BPOM (33 BB/BPOM).

Dari monitoring dan evaluasi *Roadmap SKL* sampai dengan TW IV dari 33 BB/BPOM ini didapatkan pemenuhan 29 Balai POM dengan capaian SKL di atas 70%.

Target akhir tahun 2021 untuk BB/BPOM yang mencapai nilai SKL $\geq 70\%$ adalah 25 BB/BPOM atau

75% dari 33 BB/BPOM.

Pada Bulan Juli 2021 saat terjadi pemotongan anggaran, target output disesuaikan menjadi 23 Balai Besar/Balai POM. Namun hasil monitoring dan evaluasi pada TW III progress capaian indikator kinerja ini telah melebihi dari target akhir tahun 2021 yaitu 26 BB/BPOM telah memenuhi standar kemampuan laboratorium $\geq 70\%$.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja ini tetap mengacu pada target sebelumnya yaitu 75% atau 25 BB/BPOM.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Hasil penilaian standar kemampuan laboratorium BPOM berdasarkan tabel 11 terdapat 29 BB/Balai POM yang memperoleh nilai melebihi 70% (*cutt-off* 70%). Capaian ini melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 25 BB/Balai POM yang memperoleh nilai SKL > 70%.

$$\% \text{ Realisasi IKSS 3} = \frac{29}{33} \times 100\% = 87,88\%$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{87,88}{75} \times 100\% = 117,2\%$$

Tabel 11. Hasil Penilaian Standar Kemampuan Balai Besar/Balai POM Tahun 2021

No.	Balai Besar/Balai POM	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
1	Mataram	83.3	91.4	76.5	83.7
2	Serang	79.5	88.1	78.6	82.1
3	Semarang	78.8	90.2	74.5	81.2
4	DKI Jakarta	77.7	90.0	73.9	80.5
5	Yogyakarta	76.0	87.9	77.3	80.4
6	Surabaya	80.8	81.2	78.2	80.1
7	Medan	77.8	84.6	75.2	79.2
8	Pekanbaru	75.1	80.9	76.3	77.5
9	Pontianak	77.8	85.3	68.1	77.1
10	Palembang	76.4	82.5	69.8	76.2
11	Denpasar	73.5	86.2	70.1	76.6
12	Padang	74.9	86.2	68.5	76.6
13	Bandung	73.5	84.4	71.6	76.5
14	Kupang	68.5	91.1	68.7	76.1
15	Banda Aceh	76.7	84.8	70.1	77.2
16	Manado	76.4	80.0	73.0	76.5
17	Bengkulu	72.0	84.7	69.9	75.5
18	Makassar	75.0	83.8	67.5	75.4

No.	Balai Besar/Balai POM	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
19	Batam	71.7	86.2	68.3	75.4
20	Samarinda	76.0	86.2	63.8	75.3
21	Pangkalpinang	74.3	77.7	73.0	75.0
22	Palangkaraya	64.9	87.5	72.1	74.8
23	Palu	76.5	77.0	70.0	74.5
24	Jayapura	70.8	77.8	73.8	74.1
25	Kendari	73.9	79.4	68.4	73.9
26	Banjarmasin	70.2	82.0	68.2	73.4
27	Bandar Lampung	75.9	81.1	63.3	73.4
28	Gorontalo	70.2	76.3	66.8	71.1
29	Ambon	68.3	81.8	62.8	71.0
30	Manokwari	68.0	76.1	59.9	68.0
31	Jambi	66.6	77.2	57.3	67.0
32	Mamuju	50.4	76.0	29.4	51.9
33	Sofifi	42.9	47.7	26.2	38.9
	Rata-rata	72.6	82.2	67.6	74.1

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 12. Perbandingan capaian kinerja persentase pemenuhan laboratorium BB/Balai POM sesuai standar kemampuan laboratorium tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP						
Persentase pemenuhan laboratorium BB/Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	66.7	95.29	75	87.88	117.2

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Keberhasilan

Di tahun 2021 dalam rangka pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM, PPPOMN melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan sehingga dapat memberikan intervensi dan solusi terhadap kendala pemenuhannya. Beberapa intervensi yang dilakukan oleh PPPOMN antara lain peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis secara hybrid (daring dan luring) serta mengikutsertakan dalam uji kolaborasi dan uji profesiensi.

Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM terutama untuk 4 Balai POM yang nilai SKL-nya masih dibawah 70%.

- PPPOMN melakukan program pendampingan yang lebih intensif kepada Balai POM berupa bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengujian dan ruang lingkup pengujian.
- Memberikan solusi kendala dalam pelaksanaan peningkatan SKL.
- Penyusunan perencanaan peningkatan SKL, monitoring pelaksanaan, evaluasi dan memberikan solusi pemenuhan sesuai target yang telah ditetapkan.
- Mulai tahun 2022, akan diimplementasikan regionalisasi laboratorium sehingga perlu dilakukan penyesuaian standar kemampuan laboratorium mengacu pada konsep regionalisasi laboratorium, tools penilaian, dan targetnya.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan

IKSS 4.1 Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan

Indikator sasaran strategis ini adalah persentase Metode Analisis (MA) yang dikembangkan terhadap kebutuhan. Indikator persentase MA yang dikembangkan, diukur dengan penambahan MA yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah MA tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap total target MA yang akan dicapai pada tahun 2024.

Pada TW III terjadi pemotongan anggaran APBNP di masa kondisi pandemik Covid-19, sehingga diusulkan penyesuaian total target MA yang akan dicapai. Target indikator persentase MA

yang dikembangkan merupakan target akumulatif, yaitu persentase terhadap total target MA yang akan dikembangkan sampai dengan tahun 2024. Adanya pemotongan anggaran APBNP yang terjadi selama masa pandemi selama dua tahun berturut-turut (tahun 2020 dan 2021) sangat berdampak pada capaian MA yang dikembangkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampai tahun 2024 menjadi 2.196 MA. Penyesuaian target output penambahan MA yang dikembangkan tahun 2021 dari 200 MA menjadi 152 MA.

Penambahan jumlah MA yang dikembangkan sampai dengan TW IV yaitu 178 judul MA sehingga secara kumulatif menjadi 1651 MA yaitu jumlah MA tahun 2020 (1473 MA) ditambah MA yang dikembangkan tahun 2021 (178 MA). Penambahan jumlah MA tahun 2021 terdiri dari:

- Konappza target 47 capaian **64** MA
- Pangan Olahan dan Air target 26 tercapai **24** MA
- Otskko target 30 capaian **32** MA
- MBM target 38 capaian **44** MA
- Produk Biologi target 11 capaian **14** MA

Pada tahun 2021 target pengembangan MA sebesar 74% dari target tahun 2024. MA berasal dari pengembangan oleh 4 (empat) kelompok substansi dan Balai Pengujian Produk Biologi. Pembagian target pengembangan MA disesuaikan dengan SDM yang tersedia di masing-masing kelompok substansi dan Balai Pengujian Produk Biologi.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Pencapaian % realisasi MA yang dikembangkan sampai akhir TW IV tahun 2021 diperoleh dengan perhitungan:

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Metode Analisis kimia obat, bahan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, mikrobiologi, biologi molekuler (validasi/verifikasi) sampai tahun 2021}}{\text{Total Metode Analisis sesuai standar sampai dengan tahun 2024}}$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{1473+178}{2196} \times 100\% = \mathbf{75,18\%}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\% \\ &= \frac{75,18}{74} \times 100\% \\ &= \mathbf{101,60\%} \end{aligned}$$

Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan						
Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan	63	63,17	100,27	74	75,18	101,60

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Adanya pemotongan anggaran yang terjadi selama masa pandemi selama dua tahun berturut-turut (tahun 2020 dan 2021) sangat berdampak pada capaian MA yang dikembangkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target sampai tahun 2024. Penyesuaian target yang diusulkan yaitu total MA yang dikembangkan sampai tahun 2024 yang sedianya berjumlah 2289 diusulkan menjadi 2196 judul MA. Pengurangan total target jumlah MA sebanyak 93 (2289 dikurangi menjadi 2196) sudah mempertimbangkan prioritas kebutuhan MA sampai tahun 2024, yaitu beberapa MA akan dikembangkan pada RPJMN berikutnya.

Penambahan sejumlah 26 MA yang melebihi target merupakan MA dalam rangka pengujian obat menggunakan rapid test yang akan digunakan oleh Loka POM dan MA baru lainnya dalam rangka kebutuhan penanganan kasus pengawasan Obat dan Makanan.

Rencana Tindak Lanjut

- Usulan penyesuaian target MA hingga 2024 pada renstra PPPOMN 2020-2024 karena adanya perubahan target pada tahun 2020 dan 2021
- PPPOMN akan menambah MA yang bisa dilakukan di Loka POM (pengujian secara rapid test pengujian obat).

IKSS 4.2 Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan

Baku Pembanding adalah bahan otentik dan seragam yang ditujukan untuk digunakan dalam uji kimia dan fisika khusus, untuk itu sifat-sifatnya dibandingkan melalui suatu pengujian dan mempunyai derajat kemurnian yang sesuai untuk tujuan tersebut (WHO). Penggunaan Baku Pembanding sangat penting dalam memberikan jaminan hasil pengujian terutama dalam konteks pengawasan *post market* Obat dan Makanan di Indonesia terutama dengan pemberlakuan ISO 17025 di seluruh laboratorium di lingkungan BPOM.

Pemenuhan Baku Pembanding adalah Baku Pembanding kimia dan mikroba yang mampu dikembangkan/diproduksi kembali dan diuji ulang oleh PPPOMN untuk digunakan dalam pengujian di Laboratorium BPOM. Baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada tahun 2021 sebanyak 77 Baku Pembanding kimia dan 23 baku pembanding mikroba.

Indikator persentase baku pembanding yang dikembangkan diukur dari perhitungan penambahan baku pembanding yang dikembangkan pada tahun berjalan yang diakumulasikan dengan jumlah baku pembanding tahun sebelumnya, kemudian dihitung persentase peningkatannya terhadap total target baku pembanding yang akan dicapai pada tahun 2024.

Pada TW III tahun 2021 diusulkan penurunan target persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan, target sebelumnya adalah 77% menjadi 76,56%. Hal ini disebabkan adanya perubahan alokasi anggaran berdasarkan APBN-P Tahap IV. Perhitungan capaian indikator kinerja ini berdasarkan target yang sudah disesuaikan.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Pencapaian realisasi Baku Pembanding (kimia dan mikroba) yang dikembangkan terhadap kebutuhan pada tahun 2021 diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{a+b}{c+d} \times 100\% \\ &= \frac{(785+77)+(23)}{1122+30} \times 100\% \\ &= 76,82\%\end{aligned}$$

Keterangan:

a = Total baku pembanding kimia yang dikembangkan sampai dengan TW IV 2021

b = Total baku pembanding mikroba yang dikembangkan sampai dengan TW IV 2021

c = Total Baku Pembanding Kimia yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024

d = Total Baku Pembanding Mikro yang dikembangkan sampai dengan tahun 2024

Persentase capaian IKSS pada TW IV dihitung terhadap realisasi pemenuhan baku pembanding diperoleh dengan perhitungan:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ realisasi}}{\% \text{ target}} \times 100\% \\ &= \frac{76,82}{76,56} \times 100\% \\ &= 100,34\%\end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 14. Perbandingan capaian kinerja persentase baku pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan						
Persentase Baku Pembanding yang Dikembangkan Terhadap Kebutuhan	69	69	100	76,56	76,82	100,34

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Keberhasilan

Target Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan tahun 2021 sebelumnya adalah 77% dan terjadi penurunan target menjadi 76,56% karena perubahan target dan alokasi anggaran berdasarkan APBN-P Tahap IV. Realisasi pemenuhan baku pembanding sampai dengan TW IV tahun 2021 sebesar 76,82% yang berarti target tercapai. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, pengembangan baku pembanding tetap bisa dilaksanakan sesuai perencanaan dengan pengaturan kehadiran WFO dan WFH yang komprehensif. Selain itu, ketersediaan bahan baku dan baku primer, pengadaan bahan baku dan baku primer/reagensia/sukucadang, dan proses pengujian untuk pengembangan baku pembanding berjalan sesuai dengan perencanaan.

Rencana Tindak Lanjut

- Pengadaan bahan baku dan baku primer/reagensia/suku cadang dan kebutuhan lain dalam mendukung pengembangan baku pembanding kimia dan baku mikroba dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah dibuat.
- Peningkatan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pemenuhan pengembangan baku pembanding.
- Target indikator ini bersifat akumulatif sehingga adanya penyesuaian target tahun 2021 akan berdampak pada pencapaian target tahun berikutnya. Oleh karena itu perlu penyesuaian target di tahun berikutnya.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Alat Laboratorium BPOM
yang Dikalibrasi Sesuai Standar

IKSS 5. Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar

Target alat ukur laboratorium BPOM yang dikalibrasi pada tahun 2024 adalah 3.528 alat sedangkan target pada tahun 2021 sebesar 87% (3.061 alat). Namun dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19, dilakukan penyesuaian target menjadi 82% (2.893 alat).

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Sampai dengan TW IV, Balai Kalibrasi telah melakukan kalibrasi alat sebanyak 2682 alat dengan capaian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah alat yang dikalibrasi}}{\text{Target yang direncanakan}} \times 100 \% \\ &= \frac{2.682}{3.528} \times 100\% = \mathbf{76,02 \%}\end{aligned}$$

Berdasarkan RAPK, target persentase alat yang dikalibrasi pada TW IV sebesar 82 % dari target akhir tahun 2024. Maka dapat dihitung % Capaian Indikator ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{76.02}{82} \times 100 \% = \mathbf{92,71\%}\end{aligned}$$

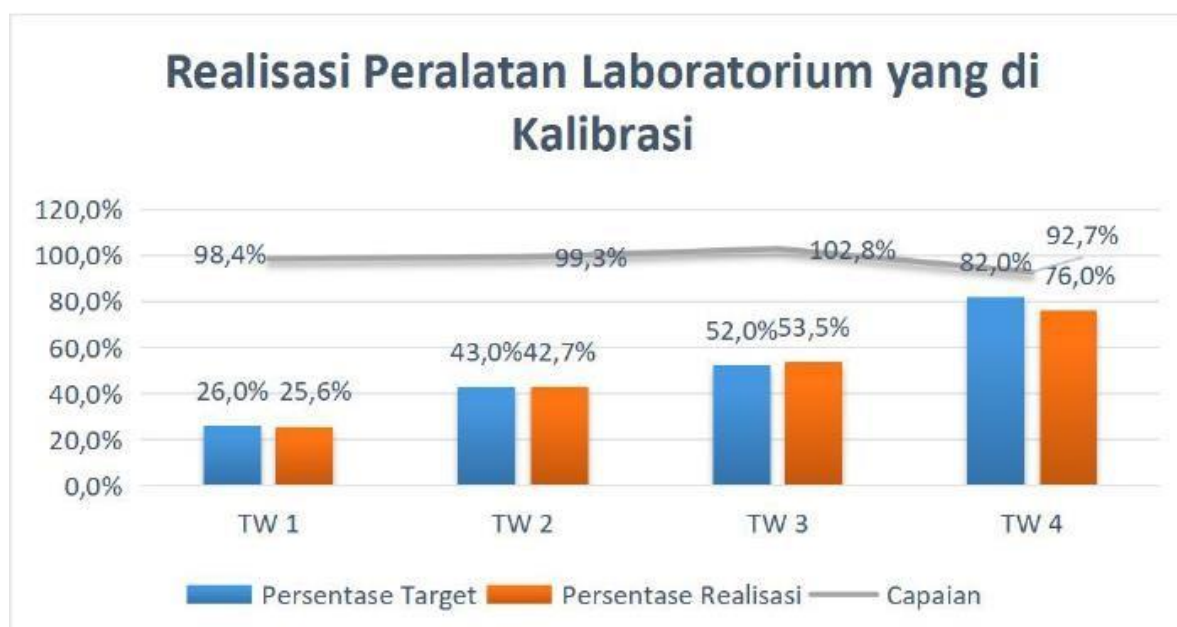
Sampai TW IV, telah dilakukan kalibrasi dengan rincian seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Pelaksanaan Kalibrasi di Balai/Balai Besar/Loka POM/Laboratorium Triwulan IV Tahun 2021

Waktu Kalibrasi	Nama Balai / Lab.	Jumlah Alat
1. Januari		336
	DKI JAKARTA	85
	JAMBI	56
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	12
	PPPOMN - BBP	14
	PPPOMN - KONAPPZA	56
	PPPOMN - MBM	35
	PPPOMN - OTSKKOS	23
	PPPOMN - PANGAN & AIR	14
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	41
2. Februari		349
	BANJARMASIN	57
	DKI JAKARTA	4
	KUPANG	18
	PALANGKARAYA	60
	PALU	78
	PEKANBARU	77
	PPPOMN - BALAI KALIBRASI	4
	PPPOMN - BBP	1
	PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	50
3. Maret		218
	BANDA ACEH	58
	BPKP PROVINSI SULSEL	1
	DITWASDISYAN	2
	INSTALASI FARMASI DINKES PROVINSI SULSEL	1
	MATARAM	68
	PALU	4
	PPPOMN - BBP	5
	PPPOMN - KONAPPZA	5
	PPPOMN - PANGAN & AIR	1
	SERANG	73
4. April		260
	AMBON	66
	BANDAR LAMPUNG	56
	DENPASAR	92
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	5
	PALU	11
	PANGKALPINANG	3
	PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	25
	PPPOMN - MBM	2
5. Mei		43
	PANGKALPINANG	14

PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
PPPOMN - BALAI PENGUJIAN KHUSUS	2
PPPOMN - MBM	18
PPPOMN - OTSKKOS	2
PPPOMN - PRODUK BIOLOGI	2
PPPOMN - SUBBAG TU	2
PT. WAHANA REMPAH	2
6. Juni	300
BATAM	65
ENDE	11
KENDARI	62
MAKASSAR	73
TANIMBAR	5
YOGYAKARTA	84
7. Juli	11
MATARAM	10
MANGGARAI BARAT	1
8. Agustus	35
Ende	3
Palu	15
PPPOMN - BALAI KALIBRASI	1
PPPOMN - BBP	4
PPPOMN - KOBONAPPZA	12
9. September	334
KUPANG	70
ENDE	24
PALANGKARAYA	23
MANOKWARI	46
SOFIFI	14
GORONTALO	20
SURABAYA	70
BANDUNG	67
10. Oktober	11
DKI JAKARTA	12
JAMBI	1
PPPOMN - BALAI KALIBRASI	4
PPPOMN - KONAPPZA	10
GORONTALO	75
BANDUNG	22
PADANG	70
PONTIANAK	49
PALEMBANG	59
DIT. KMEI	3
SAMARINDA	48
BENGKULU	70
JAYAPURA	68
11. Nopember	35

DKI JAKARTA	3
PANGKALPINANG	61
PPOMN - KONAPPZA	1
MANADO	66
MEDAN	66
SEMARANG	81
12. Desember	35
MAMUJU	25
UNIVERSITAS INDONESIA	1
PT. NUSANTARA BETA FARMA	1
GRAND TOTAL	2682



Gambar 10. Capaian Realisasi Peralatan Laboratorium yang Dikalibrasi

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 16. Perbandingan capaian kinerja persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar						
Persentase Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar	70	70,38	100,54	82	76,02	92,71

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Kendala

Sampai selesainya TW IV, jumlah alat laboratorium Obat dan Makanan yang telah dikalibrasi sebanyak 2.682 alat. Jumlah ini setara dengan 76,02% dari target 3.528 alat pengujian Obat dan Makanan pada tahun 2024. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 82%. Dengan capaian target 76,02% ini maka capaian indikator kinerja sasaran kegiatan sebesar 92,7%. Tidak tercapainya target ini disebabkan ruang lingkup kalibrasi yang tersedia belum mampu mengakomodir seluruh permintaan kalibrasi peralatan laboratorium dari BB/BPOM. Disamping itu adanya kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga pengadaan peralatan laboratorium BB/BPOM tidak dilakukan yang berdampak jumlah alat laboratorium yang akan di kalibrasi tahun 2021 menjadi tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Rencana Tindak Lanjut

- Sebagai alternatif solusi untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun berikutnya, Balai Kalibrasi akan melakukan pengusulan ke KAN BSN untuk akreditasi penambahan dan perluasan ruang lingkup kalibrasi. Dengan bertambahnya ruang lingkup kalibrasi akan mampu menambah cakupan kalibrasi peralatan pengujian Obat dan Makanan di Badan POM.
- Dilakukan review indikator kinerja pada Renstra PPPOMN 2020-2024, dengan usulan sebagai berikut:

Renstra Semula	Usulan Perubahan Renstra
Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang di kalibrasi sesuai standar	Terpenuhinya alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang di kalibrasi sesuai standar
Indikator Kinerja Semula	Usulan Indikator Kinerja
Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang di kalibrasi sesuai standar	Persentase sertifikat kalibrasi alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang diterbitkan

Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pelayanan Pengujian
Obat dan Makanan

IKSS 6.1 Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Pelayanan pengujian Obat dan Makanan merupakan salah satu tugas dan fungsi dari PPPOMN. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu menjadi parameter untuk dapat menilai peningkatan pelayanan pengujian Obat dan Makanan di PPPOMN. Berdasarkan Peraturan BPOM No. 23 tahun 2020, pengujian sampel yang masuk di PPPOMN diuji oleh dua UPT PPPOMN, kecuali sampel obat dalam rangka PQ WHO yang diuji oleh Kelompok substansi pengembangan pengujian kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif serta sampel dalam rangka jejaring pada masing-masing Kelompok substansi pengembangan pengujian di lingkungan PPPOMN.

UPT Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang produk biologi, memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengujian mutu produk biologi, pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, *bulk* vaksin dan produk biologi lainnya, pelaksanaan pengujian toksikologi Obat dan Makanan serta sistem rujukan laboratorium untuk pengujian produk biologi dan pengujian toksikologi, sedangkan UPT Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) melaksanakan pengujian kimia, mikrobiologi, dan biologi molekuler atas sampel investigasi, penyidikan, dan/atau pengkajian Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional serta pelaksanaan pengujian rujukan kimia termasuk sampel rokok, mikrobiologi, dan biologi molekuler Obat dan Makanan dalam lingkup nasional dan internasional.

Sampel yang diterima oleh UPT di Lingkungan PPPOMN adalah:

1. Sampel dari Ditwas Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NAPPZA karena adanya dugaan pelanggaran di lingkup nasional dan internasional, sampel vaksin impor, pendeteksian kandungan materi biologi/kimia/fisik jenis baru (yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya), perbedaan hasil uji antar laboratorium UPT BPOM dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Sampel dari Deputi IV dalam rangka investigasi/intelijen dan pembuktian tindak pidana/penyidikan dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Sampel dari UPT BPOM adalah sampel yang belum mampu diuji di semua UPT BPOM dalam rangka khusus/kasus/investigasi, sampel uji absah DNA, dan vaksin dalam rangka pengawasan.
4. Sampel pihak ketiga dalam rangka uji khusus/kasus/investigasi dan lot release.
5. Pengujian dalam rangka pengkajian Obat dan Makanan.

Pengujian sampel yang dilaksanakan oleh UPT BPPB dan UPT BPKOM hasilnya digunakan untuk tindak lanjut pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat atau penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, sehingga hasil uji harus cepat diperoleh untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat, oleh karena itu pemenuhan *timeline* pengujian sangatlah penting. Pada tahun 2021 PPPOMN menargetkan sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sejumlah 1.880 sampel, namun dengan adanya *refocusing* anggaran yang dikarenakan kondisi pandemik COVID-19, target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dikoreksi menjadi 1.710 sampel dengan target persentase pemenuhan *timeline* 92%.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Pemenuhan target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 1.965 sampel, dengan persentase pemenuhan *timeline* sebesar 96,75%. Data sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sampai dengan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel 17.

Tabel 17. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

No.	UPT/ POKSI	Jumlah Sampel Masuk	Jumlah Sampel Selesai Uji	Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline	Persentase Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu
1	BPPB	1.608	1.506	1.473	97,80%
2	BPKOM	503	496	463	93,35%
3	KOBONAPPZA	29	29	29	100,00%
Total		2.140	2.031	1.965	96,75%

Perhitungan realisasi dengan target *output* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji dan Memenuhi Timeline}}{\text{Jumlah Sampel Selesai Uji}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.965}{2.031} \times 100 \% \\
 &= 96,75 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{96,75 \%}{92 \%} \times 100 \% \\
 &= 105,16 \%
 \end{aligned}$$

Jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun 2021 ini sebanyak 1.965 sampel, dimana jumlah ini melebihi target sebanyak 1.710 sampel, tidak hanya dari sisi jumlah sampel saja yang melebihi target, begitupun persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu, dimana pada

tahun ini persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 96,75% dengan target 92%.

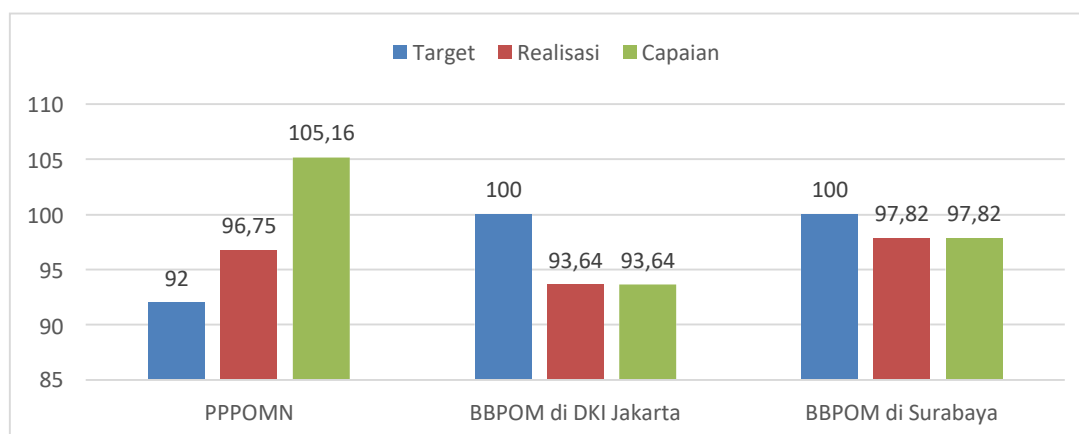
b. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Tabel 18. Perbandingan capaian kinerja persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan						
Persentase Sampel Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	91	95,62	105,08	92	96,75	105,16

Realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 ini lebih besar dari realisasi indikator tahun 2020, dimana pada tahun 2020 realisasinya sebesar 95,62% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 96,75%, hal ini menandakan semakin efisiennya proses-proses yang dilakukan dalam pelaksanaan pengerjaan sampel. Selaras dengan itu, persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2021 ini sedikit lebih besar dari tahun lalu, dimana pada tahun 2020 persentase capaiannya sebesar 105,08%, sedangkan pada tahun ini sebesar 105,16%, hal ini menandakan semakin banyaknya jumlah sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu pada tahun ini.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja dengan Unit Lain



d.

alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Pada tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu lebih besar (96,75%) dari tahun lalu, begitupun dengan persentase realisasinya (105,16%), meskipun pada tahun 2021 ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 4, namun berkat adanya pengaturan jadwal WFO, melakukan pengujian diluar jam kerja, perawatan alat secara berkala serta melakukan workshop teknis pengujian bersama narasumber secara daring untuk mencari metode-metode terbaru untuk mempercepat proses pengujian.

Dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.02.02.1.2.04.20.153 tahun 2020 tentang penugasan kepada PPPOMN dan BPOM di Gorontalo untuk melaksanakan pemeriksaan uji COVID-19, maka PPPOMN memiliki satu tugas tambahan, yaitu melaksanakan pemeriksaan pada spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19. Pada tahun 2021 jumlah spesimen/spesimen hasil ekstraksi COVID-19 sebanyak 28.056 sampel, dengan jumlah total dari pertama kali melakukan pengujian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 58.536 sampel. Hal ini bukan menjadi hambatan dalam pencapaian target sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dan dibuktikan dengan kinerja yang lebih baik dari tahun 2020.

Rencana Tindak Lanjut

Capaian Indikator Kinerja perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan perencanaan pengadaan reagen/suku cadang, media, hewan pengujian, pakan hewan sesuai jadwal dan kebutuhan sehingga sudah tersedia pada saat pelaksanaan pengujian.

IKSS 6.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); 2) Profesionalitas SDM (18%); 3) Sarana Prasarana (15%); 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan 6) Inovasi (7%). Penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Capaian Indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik PPPOMN ditetapkan pada TW IV tahun 2021. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2021 telah dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM pada tanggal 7 Juli 2021 dengan hasil 4,34/A-

(Sangat Baik).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 19. Perbandingan capaian kinerja indeks pelayanan publik PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan						
Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	3,91	3,97	101,53	4,20	4,34	103,33

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Penyebab Keberhasilan

PPPOMN selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik salah satunya dengan pengembangan aplikasi INFALABS sebagai media yang dapat diakses oleh *stakeholder* untuk mendapatkan layanan publik dari PPPOMN.

Rencana tindak lanjut

Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian indeks pelayanan publik yang dilakukan oleh tim penilai kinerja UPP BPOM perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1) Kebijakan Pelayanan

Untuk publikasi maklumat di media cetak sebaiknya lebih diperjelas terkait maklumat pelayanan PPPOMN. Publikasi melalui baliho sebaiknya dipasang pada area lebih strategis dan pada area pemerintahan lainnya.

2) Profesionalisme SDM

Pada SK Kepala PPPOMN ditambahkan informasi tambahan jam kerja (*extra time*) untuk ditahun 2022 Disarankan dalam ruang pelayanan disediakan "timer" untuk melihatwaktu pelayanan lama atau cepat.

3) Sarana Prasarana

Perlu ditambahkan data dukung CCTV.

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik Publikasi

Layanan di area publik dapat dilakukan pada tahun mendatang.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

IKSS 7. Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/keahlian.

Target jejaring tahun 2021 adalah 8 jejaring laboratorium, yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemarkan Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI)
8. Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)

Dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, pengukuran dilakukan mulai pada TW II.

Target indikator kinerja persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif tahun 2021 adalah 57% dari target akhir tahun 2024 atau 8 jejaring.

Dengan adanya pemotongan anggaran sesuai APBNP-IV, target jejaring tahun 2021 dilakukan penyesuaian/perubahan dari 57% (8 output jejaring) menjadi 50% (7 output jejaring), yaitu:

1. LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan
2. LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan
3. LRPPI Pengujian Cemarkan Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan
4. LRPPI Pengujian Bahan Kontak Pangan
5. LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan
6. LRPPI pengujian GMO dan DNA spesifik spesies dalam pangan olahan
7. Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC)

Perubahan ini mempertimbangkan bahwa untuk Jejaring Laboratorium Kosmetik Indonesia (JLKI) pada tahun 2021 baru diadakan pertemuan inisiasi/awal dan akan menjadi target Jejaring di tahun 2022.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Pemenuhan target jejaring pada TW IV adalah penambahan 2 (dua) Jejaring, yaitu LRPPI pengujian Cemaran Logam dan Mineral dalam Pangan Olahan dan LRPPI pengujian Bahan Kontak Pangan. Jika diakumulasi dengan pemenuhan TW I sampai dengan TW IV, maka capaian realisasi target tahun 2021 adalah 7 jejaring.

Perhitungan realisasi target output jejaring tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah jejaring terealisasi tahun 2021}}{\text{Jumlah target jejaring sampai tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{7 \times 100\%}{14} \\ &= 50\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\% \text{ Realisasi}}{\% \text{ Target}} \times 100\% \\ &= \frac{50\%}{50\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 20. Perbandingan capaian indikator kinerja persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif						
Persentase Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	43	43	100	50	50	100

Target indikator kinerja jejaring pada tahun 2020 adalah 43% atau 6 jejaring, pada tahun 2021 terdapat penambahan target satu (1) jejaring yaitu Jejaring Asean Pharmaceutical Testing Laboratory Committee (APTLC), sehingga realisasi target indikator tahun 2021 tercapai 50% atau 7 jejaring. Capaian ini sesuai dengan yang telah ditargetkan, sehingga persentase capaian tahun 2020 maupun 2021 adalah 100%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Analisis Keberhasilan

Pemenuhan 7 (tujuh) Jejaring di tahun 2021 sesuai dengan target pada RAPK tahun 2021 yaitu target realisasi sebesar 50%, sehingga persentase capaian IKSS adalah 100%. Pemenuhan ini tercapai karena adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan sehingga apabila terdapat kendala dapat segera diantisipasi dan percepatan untuk pemenuhan realisasi dapat terlaksana dengan baik.

Rencana Tindak Lanjut

- Capaian Indikator Kinerja perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan perencanaan pengadaan reagen/suku cadang, media dan kebutuhan lain sesuai jadwal sehingga sudah tersedia pada saat pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 8:

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN

IKSS 8.1 Indeks RB PPPOMN

Sejalan dengan Peraturan Menteri PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, BPOM senantiasa berupaya melakukan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB) melalui Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.7.01.20.22 Tahun 2020 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM. Atas dasar tersebut, PPPOMN berupaya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai RB pada 6 (enam) area perubahan dalam membangun ZI (Zona Integritas) untuk menciptakan birokrasi bermental melayani yang

berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik PPPOMN akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pada tahun 2020-2024, PPPOMN senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian ZI, Opini BPK, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dengan penerapan RB, berorientasi pada pencapaian *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Target Indikator kinerja Indeks RB PPPOMN ditetapkan pada TW IV tahun 2021. Nilai indeks RB ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. PPPOMN melakukan monev internal setiap bulan untuk mengevaluasi progres rencana kerja kelompok kerja pada 6 (enam) area perubahan. Diharapkan dengan adanya monev internal, nilai indeks RB dapat dicapai sesuai target.

a. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2021

Adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggung jawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut. Target Indikator kinerja Indeks RB PPPOMN yang ditetapkan pada tahun 2021 yang semula ditargetkan 92 menjadi 86,6. Nilai indeks RB PPPOMN tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dan selanjutnya diverifikasi oleh KemenPANRB dengan perolehan nilai 86,58 sehingga capaian indikator ini adalah 99,95%. Rincian capaian indikator kinerja indeks RB PPPOMN terdapat pada tabel 21.

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks RB PPPOMN	86,6	86,56	99,95

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

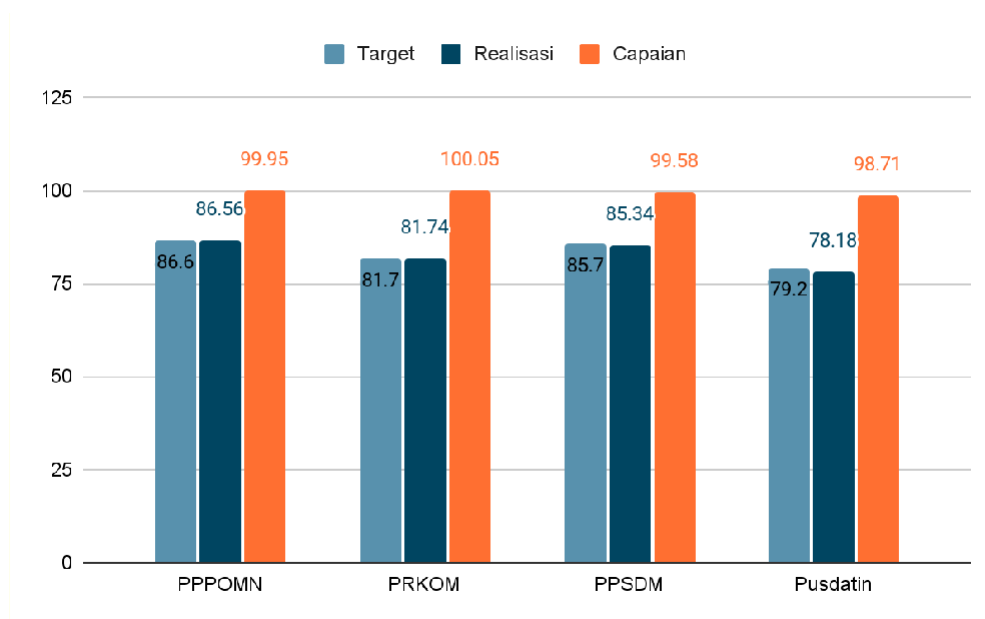
Tabel 22. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks RB PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di PPPOMN						
Indeks RB PPPOMN	91	83,06	91,27	86,6	86,58	99,95

Dari tabel diatas terlihat capaian Indeks RB PPPOMN dari 91,27% pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,95% pada tahun 2021.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dan Unit Kerja Lainnya di Pusat

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta data dukungnya dalam rangka menuju WBBM pada seluruh unit kerja di BPOM. Nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversikan dengan rata-rata penilaian Unit Kerja pusat oleh KemenPANRB di bagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2020. Dari konversi tersebut (0,888) menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi. Perbandingan capaian indeks RB antara PPPOMN dan unit kerja lainnya di Pusat terdapat pada gambar 11.



Gambar 11. Perbandingan Capaian Indikator Indeks RB antar Unit Kerja di Pusat

Berdasarkan Gambar 11 realisasi nilai Indeks RB PPPOMN dan 3 satker lainnya di unit pusat yaitu PRKOM, PPSPM, dan Pusdatin. Dari keempat unit pusat tersebut PPPOMN memiliki target indikator indeks RB paling tinggi yaitu 86,6.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut

Capaian indikator kinerja indeks RB PPPOMN mendekati 100% (99,95). Hal ini dapat tercapai karena Reformasi Birokrasi telah diimplementasikan secara konsisten dan dilakukan monitoring evaluasi secara rutin. Pada tahun 2020 PPPOMN telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan akan terus ditingkatkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahun 2021 PPPOMN diusulkan sebagai salah satu unit kerja untuk memperoleh predikat WBBM. Namun dari hasil penilaian KemenPAN-RB, PPPOMN belum

Rencana tindak lanjut

Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat untuk meningkatkan Indeks RB PPPOMN yang perlu segera ditindaklanjuti sebagai berikut:

- Melakukan upaya agar semua kegiatan pembangunan RB ZI dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana;
- Menyusun monitoring dan evaluasi terhadap perbaikan kinerja PPPOMN atas kegiatan mutasi pegawai;
- Memastikan pada saat penyusunan laporan kinerja telah memberikan informasi tentang seluruh kinerja;
- Menyusun analisis/evaluasi atas pelaporan nihil pada pelaporan gratifikasi, WBS dan pengaduan masyarakat;
- Menerapkan dan secara berkelanjutan melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder serta melaksanakan analisis dampak kemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan terhadap perbaikan unit kerja.

IKSS 8.2 Nilai AKIP PPPOMN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi. Tujuan dari pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2021 yaitu:

1. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
5. Memberikan informasi kinerja pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
6. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Fokus evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome). Perhitungan capaian indeks ini dilakukan

pada akhir tahun oleh Inspektorat. Desk evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan POM tahun 2020 telah dilakukan oleh tim inspektorat pada tanggal 14 Juni 2021 dan tindak lanjut hasil desk sedang dievaluasi oleh inspektorat.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Adanya surat revisi target indikator pada level *Learning Growth* (LG) dari unit penanggung jawab terkait, maka diperlukan penyesuaian target pada indikator tersebut. Target Indikator kinerja Nilai AKIP PPPOMN yang ditetapkan pada tahun 2021 yang semula ditargetkan 84 menjadi 77,2. Nilai AKIP PPPOMN tahun 2021 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama melalui desk evaluasi SAKIP dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti. Hasil Nilai AKIP tahun 2021 adalah 80,22 (Sangat Baik).

$$\% \text{ Realisasi} = 80,22$$

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{80,22}{77,2} \times 100\%$$

$$= 103,91\%$$

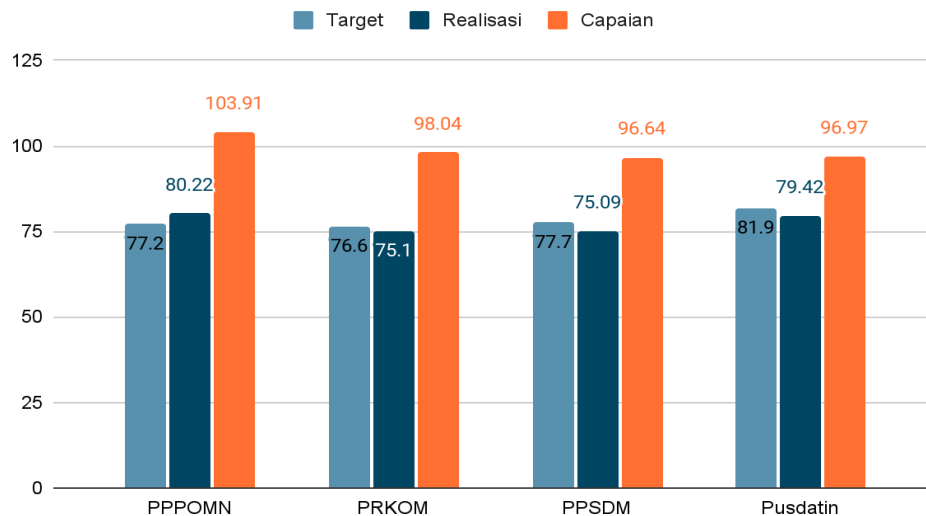
b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 23. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di PPPOMN						
Nilai AKIP PPPOMN	80	75,7	94,63	77,2	80,22	103,91

Dari tabel diatas terlihat persentase capaian Nilai AKIP PPPOMN dari 94,63% pada tahun 2020 meningkat menjadi 103,91% pada tahun 2021.

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat



Gambar 12. Perbandingan Capaian Indikator Nilai AKIP antar Unit Kerja di Pusat

Capaian indikator kinerja Nilai AKIP PPPOMN dan 3 satker pusat lainnya yaitu PRKOM, PPSDM, dan Pusdatin dapat dilihat pada Gambar 12. PPPOMN mendapatkan nilai AKIP tertinggi dibanding 3 satker tersebut dan sudah mendapatkan nilai A (sangat baik).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.

Telah dilakukan evaluasi kinerja setiap bulan melalui Rapat Monev Kinerja dan Anggaran dan Penyusunan Laporan Interim setiap triwulan, dimana telah dilakukan analisis/pembahasan keberhasilan/kegagalan serta upaya percepatan untuk meningkatkan capaian terutama untuk IKU yang capaiannya dibawah target.

Rencana Tindak Lanjut

Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP, yaitu dengan meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal dan meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.

Sasaran Strategis 9:
Terwujudnya SDM PPPOMN yang
Berkinerja Optimal

IKSS 9. Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

Kualifikasi	diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
Kompetensi	diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
Kinerja	diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
Disiplin	diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Masing-masing dimensi Indeks Profesionalitas ASN memiliki bobot penilaian yang berbeda, yaitu:

- Kualifikasi : 25 %;
- Kompetensi: 40 %;
- Kinerja : 30 %; dan
- Disiplin : 5 %.

Dari hasil perhitungan 4 dimensi Indeks Profesionalitas ASN tersebut, indeks Profesionalitas ASN dikategorikan menjadi:

- Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 : Tinggi;
- Nilai 71 - 80 : Sedang;
- Nilai 61 - 70 : Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 : Sangat Rendah

a. Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Tahun 2021

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun, pada tahun 2021 ini, indeks profesionalitas ASN masing-masing pegawai dapat dilihat di aplikasi SIASN di menu IP-ASN, dimana terdapat 167 pegawai PPPOMN yang dinilai indeks profesionalitasnya. Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional pada tahun ini sebesar 85,02 yang masuk kedalam kategori tinggi, dimana target IP ASN PPPOMN pada tahun ini sebesar 86, sehingga capaian indikator kinerja yang diperoleh sebesar 98,86%.

$$\% \text{ Capaian IKSS} = \frac{\text{Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021}}{\text{Target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{85,02}{86} \times 100 \%$$

$$= 98,86 \%$$

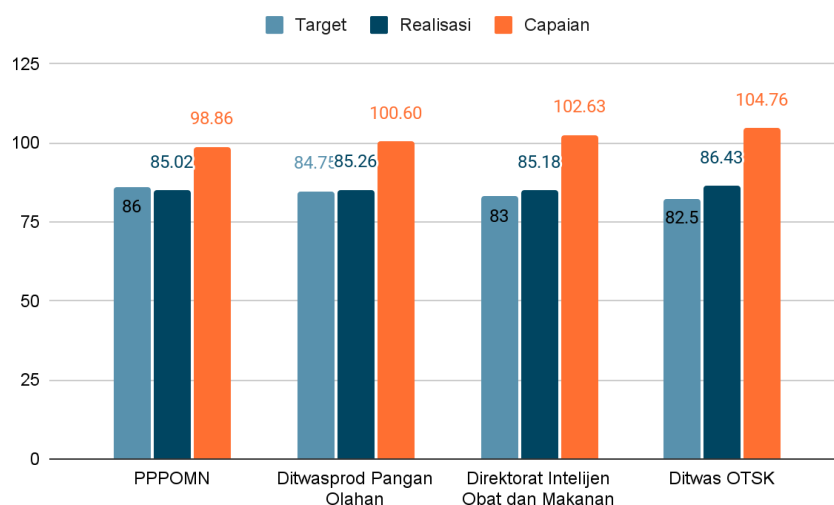
b. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Pada tahun 2020, Indeks profesionalitas ASN Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebesar 85,74 dengan capaian 114,32%, dari nilai ini dapat kita ketahui terjadi penurunan terhadap indikator kinerja indeks profesionalitas ASN pada tahun ini.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya SDM PPPOMN yang Berkinerja Optimal						
Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	75	85,74	114,32	86	85,02	98,86

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat



Gambar 13. Perbandingan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN antar Unit Kerja di Pusat
d. Analisis penyebab penurunan indeks profesionalitas ASN serta alternatif solusi yang telah dan perlu dilakukan dan rencana tindak lanjut

Tabel 25. Dimensi Kualifikasi ASN PPPOMN tahun 2021

Pendidikan	Jumlah Pegawai
Strata III	2
Strata II / Profesi	77
Starat I	63
Diploma III	19
Diploma II - SLTA	6
Dibawah SLTA	0

PPPOMN sangat concern terhadap pendidikan para Pegawainya, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang sedang menjalani tugas belajar serta sudah diusulkannya beberapa pegawai untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terkait pengusulan tugas belajar ini, memang tidak bisa dilakukan dengan jumlah yang banyak mengingat perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas organisasi.

Tabel 26. Dimensi Kompetensi Diklat Kepemimpinan ASN PPPOMN tahun 2021

Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti Sesuai Jenjang	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti Sesuai Jenjang
Diklat Kepemimpinan Tk.II	1	1
Diklat Kepemimpinan Tk.III	3	2
Diklat Kepemimpinan Tk.IV	4	1

Pada tahun 2021 ada beberapa pegawai yang dilantik menjadi struktural, hal ini menyumbang penurunan terhadap IP ASN PPPOMN, oleh karena itu diperlukan pengusulan diklat kepemimpinan bagi para pegawai tersebut sesuai dengan jenjangnya.

Tabel 27. Dimensi Kompetensi Diklat Fungsional JF ASN PPPOMN tahun 2021

Diklat Fungsional JF/Uji Kompetensi	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti
Diklat Fungsional JF/Uji Kompetensi	159	149

Jabatan fungsional yang ada di PPPOMN cukup beragam, namun yang paling mendominasi adalah JF PFM, sampai tahun ini sudah banyak yang mengikuti Diklat fungsional maupun ujian kompetensi sesuai dengan jenjangnya, namun demikian masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti diklat fungsional dikarenakan pada saat pengangkatan pertama JF PFM tidak dilakukan diklat fungsional, hal ini menjadi berkelanjutan ketika pegawai tersebut ada yang mendapatkan tugas belajar, cuti diluar tanggungan negara, ataupun belum naik kejabatan fungsional yang lebih tinggi.

Tabel 28. Dimensi Kompetensi Diklat Teknis 20 JP ASN PPPOMN tahun 2021

Diklat Teknis 20 JP	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti
Diklat Teknis 20 JP	167	159

Diklat teknis 20 JP masuk kedalam penilaian IP ASN, pada tahun 2021 ini mayoritas pegawai sudah mengikuti diklat teknis minimal 20 JP yang diselenggarakan baik secara internal setiap POKSI, internal PPPOMN, internal Badan POM baik PPSDM maupun satuan kerja lain serta dari pihak eksternal, namun masih terdapat beberapa orang yang mengikuti diklat teknis di wabah 20 JP, hal ini dimungkinkan karena diklat-diklat teknis yang diselenggarakan secara internal tidak sesuai dengan jabatan fungsional untuk beberapa pegawai tersebut.

Tabel 29. Dimensi Kompetensi Seminar ASN PPPOMN tahun 2021

Seminar	Jumlah Pegawai yang Seharusnya Sudah Mengikuti	Jumlah Pegawai yang Sudah Mengikuti
Seminar	167	167

Seluruh pegawai PPPOMN pada tahun 2021 ini sudah mengikuti seminar-seminar yang mendukung kinerja masing-masing pegawai.

Tabel 30. Dimensi Kinerja ASN PPPOMN tahun 2021

Kinerja	Jumlah Pegawai
Sangat Baik (≥ 91)	5
Baik (76 - 90)	158

Cukup (61 - 75)	1
Sedang (51 - 60)	0
Kurang (≤ 50)	0
Tidak ada	3

Kinerja ASN dinilai dari unsur SKP dan perilaku kerja, secara umum kinerja pegawai PPPOMN berkategori baik dengan rentang nilai antara 76 sampai dengan 90.

Tabel 31. Dimensi Disiplin ASN PPPOMN tahun 2021

Hukuman Disiplin 5 Tahun Terakhir	Jumlah Pegawai
Tidak Pernah	166
Tingkat Ringan	1
Tingkat Sedang	0
Tingkat Berat	0

Disiplin ASN PPPOMN terbilang baik, hal ini dapat dilihat dari 167 pegawai yang dinilai IP-nya, hanya ada 1 pegawai yang mendapatkan hukuman selama 5 tahun terakhir.

Sasaran Strategis 10:

Terkelolanya Laboratorium, Data dan Informasi
Pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN

IKSS 10. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal dihitung berdasarkan rata-rata dari penilaian berikut:

(1) Nilai indeks pemanfaatan sistem informasi

a. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi – e-mail

- Aspek login dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu login per total akun individu.
- Aspek pemanfaatan (b) dengan bobot 40%, dihitung berdasarkan total akun unit aktif per total akun unit.
- Aspek pemanfaatan (c) dengan bobot 30%, dihitung berdasarkan total akun individu aktif per total akun individu.

b. Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BOC

- Persentase aktivitas akses BOC
- Persentase aktivitas login BOC.

(2) Nilai indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC:

- Jumlah frekuensi verifikasi data.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Perhitungan capaian indeks tersebut dilakukan setiap triwulan oleh Satker Pusdatin BPOM. Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang optimal hingga TW IV tahun 2021 didapatkan 1,75. Target di tahun 2021 yaitu 2,00 selama tahun berjalan. Oleh karena itu, capaian indikator dapat dihitung sebagai berikut.

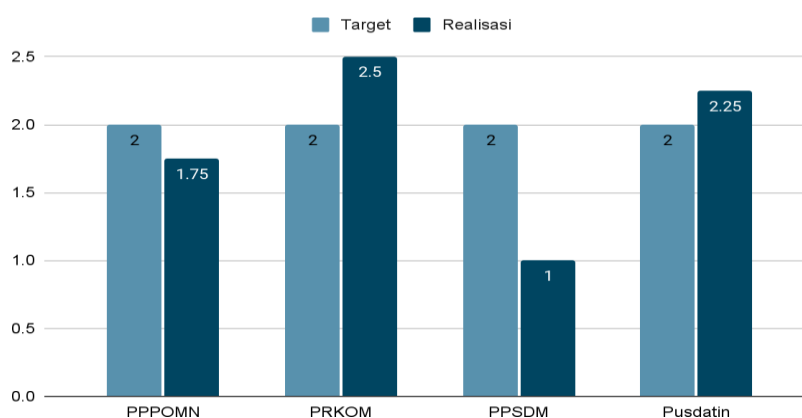
$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian IKSS} &= \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target IKK}} \\
 &= \frac{1,75 \times 100 \%}{2,00} \\
 &= 87,5 \%
 \end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 32. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di PPPOMN						
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	1,51	1,25	82,78	2,00	1,75	87,50

c. Perbandingan Capaian Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat



d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis Kendala dan Tindak Lanjut

Indikator kinerja indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal tidak dapat mencapai target hingga akhir TW IV, dikarenakan rendahnya aspek pemanfaatan sistem informasi BOC yaitu akses BOC dan login BOC rendah. Terkait penggunaan email, kendala yang dihadapi PPPOMN adalah bahwa tidak semua personel membutuhkan penggunaan email corporate.

Rencana tindak lanjut

- Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi BOC
- Meningkatkan penggunaan email corporate dengan memberikan *reminder* kepada seluruh staf secara periodik.

Sasaran Strategis 11:
Terkelolanya Keuangan PPPOMN
yang Akuntabel

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu:

(1) Nilai kinerja anggaran PPPOMN dan

(2) Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN.

IKSS 11.1 Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN

Nilai kinerja anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian *Output*.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Cara perhitungan indikator nilai kinerja anggaran PPPOMN adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (92,22 \times 60\%) + (92,41 \times 40\%) \\ &= 55,22 + 36,96.82 \\ &= 92,30 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian IKSS} &= \% \text{realisasi} / \% \text{target} \times 100\% \\ &= 92,3 / 91 \times 100\% \\ &= 98,71\%\end{aligned}$$

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 33. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Sasaran Strategis 6: Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel

Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	93,4	88,69	94,96	93,5	92,3	98,71
-------------------------------	------	-------	-------	------	------	-------

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat Tahun 2021

Perbandingan capaian nilai kinerja anggaran terhadap unit kerja lainnya di Pusat belum didapatkan data sehingga belum dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian nilai kinerja anggaran pada TW IV tahun 2021 penghitungan capaian diukur dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sampai dengan akhir Desember 2021.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan TW IV tahun 2021 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pengelolaan keuangan dan anggaran
2. Pelaporan dan evaluasi kinerja dan anggaran melalui money DJA;
3. Pelaporan Capaian Output Kegiatan
4. Revisi anggaran dan penyesuaian rencana penarikan dana; dan

Upaya tindak lanjut untuk tercapainya indikator ini di pada tahun berikutnya adalah:

1. Mempercepat realisasi pengadaan sehingga Indikator Realisasi Anggaran dapat dicapai sesuai dengan target.
2. Mengupayakan semaksimal mungkin meniadakan kesalahan dalam pembuatan SPM
3. Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP
4. Percepatan pertanggungjawaban anggaran untuk kegiatan yang telah terlaksana dan pembayaran kontrak yang telah selesai pekerjaannya.
5. Sosialisasi reformulasi IKPA terbaru dan bimtek evaluasi pelaksanaan anggaran (IKPA).

IKSS 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPPOMN

Efektivitas dinilai sebagai gambaran mengenai kemampuan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

$$\frac{\text{Realisasi belanja langsung} \times 100\%}{\text{Target belanja langsung}}$$

Pengukuran Efisiensi Anggaran Implementasi pengukuran efisiensi pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, dilakukan melalui perhitungan rasio antara realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja keseluruhan.

a. Capaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

Perhitungan capaian:

$$\begin{aligned} \text{Target (RPD)} &= \text{Rp}89.006.119.000,- \\ \text{Realisasi} &= \text{Rp}88.408.784.340,- \\ \text{Input} &= 99,33\% \\ \text{Output} &= 101,21 \\ \text{IE (output/input)} &= 1,02 \\ \text{SE} &= 1 \\ \text{TE} &= (\text{IE} - \text{SE}) / \text{SE} \\ &= (1,02 - 1) / 1 \\ &= 0,02 \end{aligned}$$

Nilai TE = 0,02 berada pada rentang 0 - 0,2 sehingga capaian TE adalah efisien.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tabel 34. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPPOMN tahun 2020 dan tahun 2021

	Tahun 2020			Tahun 2021		
Sasaran Strategis Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 6: Terkelolanya Keuangan PPPOMN yang Akuntabel						
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPPOMN	90	100	111,11	91	100	109,89

c. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja PPPOMN dengan Unit Kerja Lainnya di Pusat Tahun 2021

Perbandingan capaian tingkat efisiensi anggaran terhadap unit kerja lainnya di Pusat belum didapatkan data sehingga belum dapat dibandingkan.

alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN sudah memenuhi target karena selalu dilakukan monitoring terhadap rencana penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulan. PPPOMN juga melakukan percepatan realisasi pengadaan barang/jas, melakukan optimalisasi terhadap kegiatan yang penggunaan anggarannya tidak terserap maksimal.

3.2 Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2021 pemerintah akan melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui penguatan value for money. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial. Selain itu dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, diinstruksikan setiap Kementerian/Lembaga untuk mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang K/L.

Pada tahun 2021 TW I PPPOMN memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 12 Nopember 2020 sebesar Rp.105.370.538.000. Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai sebesar Rp24.126.484.000, Belanja Modal Rp 48.022.572.000 dan Belanja Barang Rp.33.221.482.000. Pada tanggal 26 Mei 2021 dilakukan Penghematan Belanja Pegawai terkait adanya Penghematan Anggaran dalam Tunjangan Kinerja (tukin) THR dan Gaji ke-13 senilai Rp1.544.000.000,- sehingga anggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional menjadi Rp103.826.538.000.

Pada bulan Juli dilakukan Penghematan APBNP ke III dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM sehingga pagu anggaran PPPOMN dari Rp103.826.538.000 menjadi Rp98.911.119.000.

Pada Agustus Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat dan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.07.21.355 perihal Penyampaian Data Penghematan Anggaran TA 2021. Anggaran PPPOMN dari Rp98.911.119.000. menjadi Rp89.006.119.000.

Realisasi anggaran PPPOMN sampai dengan TW IV adalah sebesar Rp88.408.784.34 atau sebesar 99,27%. Nilai ini belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana sampai dengan TW IV yaitu senilai 100 % dan target yang akan dicapai yaitu 99,30%. Capaian ini di bawah target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan TW IV yaitu 100%. Adanya *gap* 0,73% ini dikarenakan ada



nya sisa anggaran dari akun belanja pegawai dan akun belanja bahan sisa pengadaan reagen serta akun covid yang tidak dapat di optimalisasikan.

Rincian realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 35. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	IKSS	Nama IKSS	Anggaran per IKU	Realisasi anggaran Per IKU	Persen realisasi
SS1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 1	Nilai Persentase pemenuhan laboratorium BPOM terhadap Standar Kemampuan Laboratorium	Rp 1.018.594.000	Rp 1.014.078.495	99,56
		IKSS 2	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	Rp 1.643.876.000	Rp 1.626.135.330	98,92
SS 2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	IKSS 3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	Rp 348.556.900	Rp 343.526.220	98,56
SS 3	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	IKSS 4	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium*	Rp 875.188.500	Rp 867.873.675	99,16
SS 4	Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	IKSS 5	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	Rp 18.654.274.000	Rp 18.630.140.312	99,87
		IKSS 6	Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	Rp 2.041.210.000	Rp 2.007.880.184	98,37
SS 5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	IKSS 7	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Rp 962.680.000	Rp 959.369.913	99,66
SS 6	Meningkatnya Pelayanan pengujian Obat dan Makanan	IKSS 8	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rp 22.588.494.500	Rp 22.358.302.969	98,98

		IKSS 9	Indeks pelayanan publik PPPOMN	Rp 4.654.348.300	Rp 4.641.410.691	99,72
SS 7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	IKSS 10	Persentase jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Rp 573.439.500	Rp 564.542.439	98,45
SS 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	IKSS 11	Indeks RB PPPOMN	Rp 18.607.993.000	Rp 18.492.278.903	99,38
		IKSS 12	Nilai AKIP PPPOMN	Rp 3.890.333.700	Rp 3.869.666.592	99,47
SS 9	Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	IKSS 13	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	Rp 12.464.044.100	Rp 12.359.248.118	99,16
SS 10	Terkelolanya laboratorium, data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	IKSS 14	Status akreditasi	-	-	-
		IKSS 15	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	Rp 291.199.600	Rp 287.552.280	98,75
SS 11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	IKSS 16	Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	Rp 351.848.900	Rp 347.657.420	98,81
		IKSS 17	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Rp 40.038.000	Rp 39.120.800	97,71
Total		-		Rp 89.006.119.000	Rp 88.408.784.340	99,33

Tabel 36. Capaian Kegiatan Per Indikator

Sasaran strategis	Indikator	target 2021	Realisasi			Capaian terhadap target (%)
			pembilang	penyebut	realisasi	
Menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76%	0	0	76,77%	101,01
	Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan laboratorium BPOM	5%	-		5%	100
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di PPPOMN	90	-	-	92,66	102,96
Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar (GLP)	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75%	29	33	87,88	117,17
Meningkatnya metode analisis pengujian Obat dan Makanan yang dikembangkan	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74%	1651	2196	75,18	101,60
	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan	76.56%	885	1152	76,82	100,34
Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	82%	2682	3528	76,02	92,71

Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	1981	2031	97,54	106,02
	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,2	-	-	4,34	103,33
Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	50%	7	14	50%	100.00
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	Indeks RB PPPOMN	86,6	-	-	86,56	99,95
	Nilai AKIP PPPOMN	77,2	-	-	80,22	103,91
Terwujudnya SDM PPPOMN yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86	-	-	85,02	98,86
Terkelolanya Laboratorium, data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di PPPOMN	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	2	-	-	1,75	87,5
Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	93,5	-	-	92,30	98,71
	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	91%	100.00	1	100%	109,89

Tabel 37. Capaian dan Realisasi Anggaran Per Rincian Output

No	Kegiatan	Output	Koordinator	Satuan	Volume Output			Anggaran		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Kemitraan	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif	Dra. Sitoresmi Triwibowo	Jejaring	7	7	100,00	1.088.077.000	1.068.032.001	98,16%
2	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan	Dra. Mirawati Siregar, Apt, M.Si	MA	152	178	117,11	39.580.789.000	39.393.538.304	99,53%
3	Pengawasan dan Pengendalian Produk	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar	Henry Handoyo, S.Si, M.Si	Alat Lab	2893	2682	92,71	994.905.000	991.257.388	99,63%
		Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	Dwi Damayanti, S.Si, Apt, Dra. Elizabeth Ika Prawahju Arisetianingsih, (M.Biomed)	sampel	1710	1981	115,85	6.288.500.000	6.200.013.006	98,59%
4	Sarana Bidang Kesehatan	Layanan Sarana Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Wiratmoko, S. Si	Paket	80	80	100,00	1.080.106.000	1.071.719.670	99,22%

5	Penelitian dan Pengembangan Produk	Baku Pembanding yang dikembangkan	Atiek Supardiati Eka S, S.Si, Apt, MKM	Baku Pembanding	77	100	129,87	1.506.177.000	1.474.842.914	97,92%
6	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	Dra. Nany Bodrorini, Apt	Laboratrium	23	29	126,09	2.061.987.000	2.038.141.232	98,84%
		Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design	Tanti Lanovia, S. Si, Apt, M. Si	Laboratrium	1	1	100	1.221.634.000	1.203.306.197	98,50%
7	Layanan Perkantoran	Layanan Perkantoran PPPOMN		Layanan	1	1	100	35.183.944.000	34.967.933.628	99,39%
Total								89.006.119.000	88.408.784.340	99,33%

3.3. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

3.3.1. Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*.

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} = 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Hasil analisis efisiensi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Tingkat Efisiensi Anggaran Per Sasaran Strategis

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	76,77	101,01	1.018.594.000	1.014.078.495	99,56	1,01	0,01	100 %
2	Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan laboratorium BPOM	5	5	100,00	1.643.876.000	1.626.135.330	98,92	1,01	0,01	100 %
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik di PPPOMN	90,00	92,66	102,96	348.556.900	343.526.220	98,56	1,04	0,04	100 %
4	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75,00	87,88	117,17	875.188.500	867.873.675	99,16	1,18	0,18	100 %
5	Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74,00	75,18	101,59	18.654.274.000	18.630.140.312	99,87	1,02	0,02	100 %
6	Persentase baku pembandingan yang dikembangkan sesuai kebutuhan	76,56	76,82	100,34	2.041.210.000	2.007.880.184	98,37	1,02	0,02	100 %
7	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	82,00	76,02	92,71	962.680.000	959.369.913	99,66	0,93	-0,07	75 %
8	Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	97,54	106,02	22.588.494.500	22.358.302.969	98,98	1,07	0,07	100 %
9	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,20	4,34	103,33	4.654.348.300	4.641.410.691	99,72	1,04	0,04	100 %
10	Persentase jejaring laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	50,00	50	100,00	573.439.500	564.542.439	98,45	1,02	0,02	100 %
11	Indeks RB PPPOMN	86,60	86,56	99,95	18.607.993.000	18.492.278.903	99,38	1,01	0,01	100 %
12	Nilai AKIP PPPOMN	77,20	80,22	103,91	3.890.333.700	3.869.666.592	99,47	1,04	0,04	100%
13	Indeks profesionalitas ASN PPPOMN	86,00	85,02	98,86	12.464.044.100	12.359.248.118	99,16	0,99	-0,01	75 %
14	Status Akreditasi	-	-		-	-				
15	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi PPPOMN yang Optimal	2,00	1,75	87,50	291.199.600	287.552.280	98,75	0,89	-0,1	75 %
16	Nilai kinerja anggaran PPPOMN	93,50	89,16	95,36	351.848.900	347.657.420	98,81	0,97	-0,03	75 %
17	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	91,00	100	109,89	40.038.000	39.120.800	97,71	1,12	0,12	100 %
TOTAL				101,21	89.006.119.000	88.408.784.340	99,33	1,02	0,02	100 %

Berdasarkan perhitungan efisiensi sampai dengan TW IV tahun 2021, seluruh indikator kinerja di PPPOMN masuk kategori efisien.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, dan begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input* yang hanya berupa dana dan indikator



kinerja. Untuk kedepannya, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai.

3.3.2. Efektivitas

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV - PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) memiliki 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Pada tahun 2021, dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja tersebut hanya 16 (enam belas) indikator yang diukur karena satu indikator kinerja yaitu status akreditasi baru ditetapkan targetnya pada tahun 2022. Secara garis besar dari 16 indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan nilai sebagai berikut: satu indikator mencapai nilai kriteria sangat baik $110\% < x \leq 120\%$, 14 (empat belas) indikator mencapai nilai kriteria baik ($90\% \leq x < 110\%$), dan satu indikator masih kategori cukup ($70\% \leq x < 90\%$), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kriteria Sangat Baik ($110\% < x \leq 120\%$)

1. Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP

b. Kriteria Baik ($90\% \leq x < 110\%$)

1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian
2. Persentase pemenuhan Grand Design (GD) penguatan Laboratorium BPOM
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN
4. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan
5. Persentase baku pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan
6. Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar
7. Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu
8. Indeks pelayanan publik PPPOMN
9. Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif
10. Indeks RB PPPOMN
11. Nilai AKIP PPPOMN
12. Indeks profesionalitas ASN PPPOMN
13. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN
14. Nilai Kinerja Anggaran

c. Kriteria Cukup ($70\% \leq x < 90\%$)

1. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal

Belum tercapainya nilai indeks pengelolaan data dan informasi disebabkan belum optimalnya penggunaan email corporate oleh seluruh staf dan intensitas login melalui akun Kepala Unit Kerja untuk mengakses dashboard BOC yang perlu ditingkatkan.

4.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan agar dapat meningkatkan kinerja PPPOMN yaitu:

1. Sebagai unit kerja yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pengujian PPPOMN diharapkan mampu mengkoordinir dan mengawal efektivitas dan efisiensi laboratorium BPOM sesuai dengan konsep Regionalisasi yang akan diimplementasikan di tahun 2022. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Regionalisasi Laboratorium perlu dilakukan dengan cermat sebagai acuan tindak lanjut dan perbaikan agar menghasilkan output yang diharapkan sehingga tujuan peningkatan efektivitas dan efisiensi laboratorium BPOM dapat tercapai.
2. Perlu segera disusun Standar Kemampuan Laboratorium beserta *tools* penilaian yang sesuai dengan konsep Regionalisasi Laboratorium, sehingga indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Pengujian dapat diukur dengan baik.
3. Perlu dilakukan penguatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan baik secara nasional, ASEAN maupun internasional untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pengawasan Obat dan Makanan di bidang pengujian.
4. Pelayanan publik di PPPOMN perlu terus ditingkatkan melalui pemanfaatan aplikasi INFALABS dan inovasi perlu terus dikembangkan agar dapat memberikan kemudahan pelanggan dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan prima seperti pelayanan pengujian, penyediaan baku pembanding, kultur mikroba, hewan uji, dan provider uji profesiensi serta kalibrasi alat laboratorium, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik dapat meningkat.
5. Perlu dilakukan percepatan produksi metode analisis sesuai kebutuhan, peningkatan peran dan kapasitas PPPOMN sebagai produsen baku pembanding dan provider uji profesiensi perlu terus ditingkatkan serta persiapan akreditasi ISO/IEC 17034 sebagai produsen bahan acuan dan ISO/IEC 17043 sebagai provider uji profesiensi segera dilakukan.
6. Berdasarkan evaluasi dari Pusdatin, nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal masih belum baik, sehingga perlu upaya peningkatan nilai indeks pengelolaan data dan informasi dengan penggunaan email corporate oleh seluruh staf dan intensitas login melalui akun Kepala Unit Kerja untuk mengakses dashboard BOC.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id, sekretariatppomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama
Nama : Mohamad Kashuri, S.Si. Apt. M.Farm
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Disebut pihak pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id, sekretariatppomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium / Pengujian 2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design (GD)</i> penguatan laboratorium BPOM	76 5
2.	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	86,00
3.	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75
4.	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan 2. Persentase Baku Pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74 77
5.	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	87
6.	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu 2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	92 4,06
7.	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN 2. Nilai AKIP PPPOMN	92 84
9.	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77
10.	Terkelolanya Laboratorium,	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,00

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id, sekretariatppomn@gmail.com Website : www.pom.go.id

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	PPPOMN yang optimal	
11.	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN 2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	94,15 Efisien (91%)

Kegiatan

1. Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Anggaran

Rp 105.370.538.000,-

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional



Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021				ANGGARAN (RUPIAH)
			B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium /Penguatan	-	-	-	76	552.050.000
		2. Persentase pemenuhan <i>Grand Design (GD)</i> penguatan laboratorium BPOM	-	-	-	5	2.012.520.000
2	Meningkatnya kepuasan Stakeholder terhadap layanan PPPOMN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Publik di PPPOMN	-	-	-	86,00	451.729.700
3	Meningkatnya laboratorium BB/Balai POM yang memenuhi standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	-	-	-	75	1.628.393.500
4	Meningkatnya metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	1. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	66	68	71	74	26.222.825.500
		2. Persentase Baku Pembandingan yang dikembangkan terhadap kebutuhan	69	71	73	77	2.740.460.000
5	Meningkatnya alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	29	49	72	87	974.077.000
6	Meningkatnya pelayanan pengujian Obat dan Makanan	1. Persentase sampel Obat dan makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92	92	92	92	27.782.343.500
		2. Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	-	-	-	4,06	5.171.717.200
7	Meningkatnya jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	-	14,3	28,6	57	1.348.566.500

8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di PPPOMN	1. Indeks RB PPPOMN	-	-	-	92	18.877.615.100
		2. Nilai AKIP PPPOMN	-	-	-	84	3.771.017.700
9	Terwujudnya SDM PPPOMN Yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	-	-	-	77	12.782.074.800
10	Terkelolanya Laboratorium, data dan informasi pengawasan obat dan makanan di PPPOMN	Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	-	-	-	2,00	529.705.800
11	Terkelolanya keuangan PPPOMN yang akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	54	64	84	94,15	470.551.700
		2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	Efisien (91%)	54.890.000

Jakarta, 9 Desember 2020
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Mohamad Kashuri. S.Si. Apt. M.Farm

Lampiran 3. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Perhitungan Indeks Pusat

Periode : Triwulan I-IV

No	Nama Balai	Data dan Informasi Mutakhir	Jumlah	Pemanfaatan Sistem Informasi		Jumlah	Total Nilai $i = b + e / 2$
		Dashboard BOC (a)	b = a	Email (c)	Dashboard BOC (d)	e = c + d / 2	
1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3	3	3	3	3	3,00
2	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	2	3	2,5	2,75
3	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	3	3	2	3	2,5	2,75
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	3	3	1	3	2	2,50
5	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	3	3	2	2	2	2,50
6	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3	3	1	3	2	2,50
7	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	2	2	3	2	2,5	2,25
8	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2	2	2	3	2,5	2,25
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	2	2	2	2	2	2,00
10	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3	3	2	0	1	2,00
11	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3	3	1	0	0,5	1,75
12	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2	2	2	1	1,5	1,75
13	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2	2	2	1	1,5	1,75
14	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	1	1	3	2	2,5	1,75
15	Direktorat Cegah Tangkal	2	2	2	1	1,5	1,75
16	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	1	1	2	1	1,5	1,25
17	Inspektorat I	1	1	2	0	1	1,00
18	Inspektorat II	1	1	2	0	1	1,00
19	Biro Hukum dan Organisasi	1	1	1	1	1	1,00
20	Biro Sumber Daya Manusia	1	1	2	0	1	1,00
21	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	2	0	1	1,00
22	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	1	1	2	0	1	1,00
23	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	1	1	2	0	1	1,00
24	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	1	1	2	0	1	1,00

Lampiran 4. Surat perubahan target IKM



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebar Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspekturat.utama@pom.go.id, hirtambadepom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.7.11.04.21.103 Jakarta, 13 April 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024

Yth.
Kepala Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM (terlampir)
di tempat

Sehubungan dengan perubahan Renstra Badan POM tahun 2020-2024, maka Inspekturat Utama melakukan perhitungan ulang target berdasarkan nilai SKM tahun 2020 (sebagai baseline) dan masukan target dari Unit Pelayanan Publik (UPP), dengan hasil penetapan target sebagai berikut:

Target semula

Indikator Kinerja Utama	Nilai SKM 2019 (Baseline)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SKM UPP Pusat	80,66	84,29	86,23	88,00	89,73	92,00
SKM UPP BB/BPOM	87,37	87,15	88,39	89,59	90,52	92,00
SKM UPP Loka POM	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00
SKM Badan POM	84,47	86,19	87,95	89,26	90,42	92,00

Perubahan target

Indikator Kinerja Utama	Nilai SKM 2020 (Baseline)	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
SKM UPP Pusat	83,46	-	85,27	86,23	87,20	88,17
SKM UPP BB/BPOM	88,45	-	90,61	91,50	92,28	93,08
SKM UPP Loka POM	-	-	86,93	88,17	89,27	90,47
SKM Badan POM	87,00	-	88,46	89,45	90,35	91,29

Rincian target nilai SKM Unit Pelayanan Publik Pusat dan BB/BPOM sebagaimana pada Lampiran 2.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebar Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspekturat.utama@pom.go.id, hirtambadepom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Diharapkan agar UPP dapat menyesuaikan target SKM tersebut pada dokumen Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja serta dokumen perencanaan lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Utama
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Penebar Negeri No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspekturat.utama@pom.go.id, hirtambadepom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Lampiran Surat

Nomor : B-PI.06.7.11.04.21.103
Tanggal : 13 April 2021

Yth.

1. Direktur Registrasi Obat
2. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
3. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
4. Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
5. Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
6. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
7. Direktur Pengawasan Kosmetik
8. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
9. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
10. Direktur Registrasi Pangan Olahan
11. Direktur Pengawasan Peredaran pangan Olahan
12. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
13. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
14. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
15. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
16. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
17. Kepala Balai Besar/ Balai POM di lingkungan Badan POM
18. Kepala Loka POM Mandiri

NO	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)					Menjadi (Sesuai perhitungan & masukan UPP)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
19	Balai Besar POM Di Pekanbaru	92,00	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
20	Balai Besar POM Di Palembang	91,74	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	91,75	92,00	92,50	93,00
21	Balai Besar POM Di Bandar Lampung	92,08	86,00	87,50	89,00	90,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00
22	Balai Besar POM Di Jakarta	88,19	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
23	Balai Besar POM Di Bandung	85,91	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
24	Balai Besar POM Di Semarang	88,11	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
25	Balai Besar POM Di Yogyakarta	89,10	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	89,50	90,00	90,50	91,00
26	Balai Besar POM Di Surabaya	91,50	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00
27	Balai Besar POM Di Serang	85,51	86,50	88,00	89,50	90,50	92,00	86,00	88,00	89,00	90,00
28	Balai Besar POM Di Denpasar	89,28	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,10	90,20	90,30
29	Balai Besar POM Di Mataram	90,51	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
30	Balai Besar POM Di Pontianak	89,32	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00
31	Balai Besar POM Di Palangka Raya	89,40	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00
32	Balai Besar POM Di Banjarmasin	89,18	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	91,50	92,00
33	Balai Besar POM Di Samarinda	85,16	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
34	Balai Besar POM Di Manado	88,12	82,50	84,00	86,50	88,50	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
35	Balai Besar POM Di Makassar	93,31	89,00	90,00	90,50	91,00	92,00	90,00	93,00	93,50	94,00
36	Balai Besar POM Di Jayapura	88,20	88,00	89,50	90,50	91,00	92,00	89,50	90,50	91,00	92,00
37	Balai POM Di Jambi	86,02	81,00	83,50	86,50	88,50	92,00	88,00	89,00	90,00	91,00
38	Balai POM Di Bengkulu	92,14	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00
39	Balai POM Di Batam	86,69	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	88,00	89,00	90,00	91,00
40	Balai POM Di Kupang	87,02	84,00	85,50	87,50	89,50	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
41	Balai POM Di Palu	89,08	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00
42	Balai POM Di Kendari	88,54	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00
43	Balai POM Di Ambon	94,99	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	95,50	96,00	96,50	97,00
44	Balai POM Di Pangkalpinang	90,83	81,50	83,50	86,50	88,50	92,00	91,00	91,25	91,50	91,75
45	Balai POM Di Gorontalo	91,47	89,00	90,00	90,50	91,00	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
46	Balai POM Di Manokwari	99,09	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	99,00	99,00	99,00	99,00
47	Balai POM Di Mamuju	82,92	83,50	85,50	87,50	89,50	92,00	86,75	88,50	91,00	92,00
48	Balai POM Di Sotifi	90,43	81,00	83,50	86,50	88,50	92,00	91,00	91,50	92,00	92,50
49	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	87,50	88,00	89,00
50	Loka POM di Kabupaten Banyumas	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
51	Loka POM di Kota Baubau	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00

Lampiran 2 Surat
 Nomor : B-PI.06.7.71.04.21.103
 Tanggal : 13 April 2021

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)					Menjadi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Sekretaris Utama			85,30	79,50	83,00	86,00	89,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
1	Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan	85,30	79,50	83,00	86,00	89,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif			84,47	84,875	86,625	88,25	90,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
2	Dit. Registrasi Obat	82,37	82,00	84,50	87,00	89,00	92,00	85,00	86,00	87,00	88,00	
3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, NPP	85,16	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
4	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, NPP	88,01	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00	
5	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	85,30	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik			82,58	82,83	85,50	87,50	89,38	92,00	83,50	84,38	85,25	86,13
6	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81,36	79,00	82,00	85,00	88,00	92,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
7	Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	86,07	86,00	88,00	89,50	90,50	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
8	Dit. Pengawasan Kosmetik	83,63	83,50	86,00	87,50	89,00	92,00	84,00	84,50	85,00	85,50	
9	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	-	-	86,00	88,00	90,00	92,00	80,00	81,00	82,00	83,00	
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			82,63	85,60	87,20	88,70	90,10	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00
10	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	83,88	85,00	86,50	88,00	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
11	Dit. Registrasi Pangan Olahan	82,60	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
12	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	80,85	88,00	89,50	91,00	91,50	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
13	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	89,40	85,50	87,00	88,50	90,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
14	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,90	84,00	86,00	87,50	89,00	92,00	84,00	85,00	86,00	87,00	
15	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	89,51	84,50	86,00	87,50	89,00	92,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
16	Balai Besar POM Di Banda Aceh	93,44	85,00	87,00	88,50	90,00	92,00	95,00	96,00	97,00	98,00	
17	Balai Besar POM Di Medan	89,87	89,50	90,00	90,50	91,00	92,00	91,00	92,00	93,00	94,00	
18	Balai Besar POM Di Padang	89,97	88,50	89,50	90,50	91,00	92,00	90,00	90,50	91,00	92,00	

NO	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM 2020	Target Semula (Surat Irtama 2 April 2020)					Menjadi (Sesuai perhitungan & masukan UPP)			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
52	Loka POM di Kabupaten Bogor	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
53	Loka POM di Kota Dumai	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	83,00	84,00	85,00	86,00
54	Loka POM di Kabupaten Ende	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	85,00	87,00	89,00	92,00
55	Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	88,00	89,00	90,00
56	Loka POM di Kabupaten Kediri	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
57	Loka POM di Kabupaten Mimika	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
58	Loka POM di Kota Surakarta	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	85,00	86,00	87,00	88,00
59	Loka POM di Kabupaten Tangerang	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	88,00	89,00	90,00
60	Loka POM di Kota Tarakan	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	87,00	88,00	89,00	90,00
61	Loka POM di Kota Tasikmalaya	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	86,00	88,00	90,00	92,00
62	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
63	Loka POM di Kota Palopo	-	-	89,00	90,00	91,00	92,00	89,00	90,00	91,00	92,00
Rata-rata BPOM (Pusat, Balai dan Loka Mandiri)		-	86,19	87,95	89,26	90,42	92,00	88,46	89,45	90,35	91,29

4. Dalam rangka upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan IPP UPP di lingkungan BPOM tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Rancangan Surat Sekretaris Utama BPOM hal Tindak Lanjut Rekomendasi Penilaian Kinerja UPP di Lingkungan BPOM Tahun 2020. Kami mohon persetujuan Ibu pada surat terlampir.

Riati Anggrani, S.H., M.A.R.S., M.Hum.

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BPOM PUSAT

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	2019	2020
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,14	4,56
2	Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategi Pimpinan	3,80	4,48
3	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	3,33	4,35
4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2,96	4,33
5	Direktorat Pengawasan Kosmetik	3,22	4,26
6	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2,91	4,24
7	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,26	4,24
8	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	3,85	4,21
9	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	2,70	3,98
10	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,62	3,97
11	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,14	3,90
12	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,14	3,89
13	Direktorat Registrasi Obat	3,44	3,79
14	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	3,80

Lampiran I

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

Satker	2019	2020
Unit Kerja Pusat	3,35	4,14
Balai Besar/Balai POM	3,33	4,00
Unit Kerja Eselon I		
Sekretariat Utama	3,71	4,23
Deputi I	3,17	3,98
Deputi II	3,13	4,25
Deputi III	3,51	4,18
IPP BPOM	3,33	4,04

REKAPITULASI INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP UPT BPOM

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	2019	2020
1	Balai Besar POM di Denpasar	3,59	4,52
2	Balai POM di Manokwari	2,80	4,38
3	Balai Besar POM di Mataram	3,48	4,31
4	Balai Besar POM di Yogyakarta	3,98	4,29
5	Balai POM di Bengkulu	3,54	4,29
6	Balai Besar POM di Serang	3,41	4,25
7	Balai POM di Ambon	3,35	4,22
8	Balai Besar POM di Padang	3,36	4,21
9	Balai Besar POM di Samarinda	3,38	4,21
10	Balai Besar POM di Bandung	2,85	4,20
11	Balai Besar POM di Bandar Lampung	3,27	4,17
12	Balai Besar POM di Semarang	3,05	4,14
13	Balai Besar POM di Surabaya	4,14	4,11
14	Balai Besar POM di Pekanbaru	3,50	4,10
15	Balai Besar POM di Jayapura	3,34	4,08
16	Balai POM di Palu	2,94	4,02
17	Balai Besar POM di Jakarta	3,13	4,00
18	Balai POM di Gorontalo	3,46	3,96
19	Balai Besar POM di Makassar	3,33	3,95
20	Balai POM di Kupang	3,36	3,95
21	Balai POM di Pangkal Pinang	3,48	3,95
22	Balai Besar POM di Manado	3,36	3,91
23	Balai POM di Batam	3,59	3,91
24	Balai POM di Sofifi	2,96	3,88
25	Balai Besar POM di Medan	3,35	3,84
26	Balai Besar POM di Pontianak	3,42	3,83
27	Balai Besar POM di Palembang	3,36	3,80
28	Balai POM di Kendari	3,23	3,79
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	2,82	3,69
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,35	3,64
31	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,46	3,62
32	Balai POM di Jambi	3,42	3,51
33	Balai POM di Mamuju	2,82	3,49

Lampiran II

Matriks Usulan Perubahan Target Indeks Pelayanan Publik BPOM Tahun 2021-2024

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya				Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
1	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,56	4,36	4,41	4,46	4,51	4,60	4,65	4,70	4,75
2	Balai Besar POM di Denpasar	4,52	4,06	4,21	4,36	4,51	4,55	4,60	4,65	4,70
3	Biro Hukum dan Organisasi	4,48	4,06	4,21	4,36	4,51	4,51	4,55	4,60	4,65
4	Balai POM di Manokwari	4,38	3,46	3,81	4,16	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60
5	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,35	3,76	4,01	4,26	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,33	3,46	3,81	4,16	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60
7	Balai Besar POM di Mataram	4,31	3,76	4,01	4,26	4,51	4,45	4,51	4,55	4,60
8	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,29	4,36	4,41	4,46	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60
9	Balai POM di Bengkulu	4,29	4,06	4,21	4,36	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60
10	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,26	3,76	4,01	4,26	4,51	4,40	4,51	4,55	4,60
11	Balai Besar POM di Serang	4,25	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
12	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,24	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
13	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,24	3,46	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya				Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023
14	Balai POM di Ambon	4,22	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
15	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,21	4,06	4,21	4,36	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
16	Balai Besar POM di Samarinda	4,21	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
17	Balai Besar POM di Padang	4,21	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
18	Balai Besar POM di Bandung	4,20	3,46	3,81	4,16	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
19	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,17	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
20	Balai Besar POM di Semarang	4,14	3,76	4,01	4,26	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
21	Balai Besar POM di Surabaya	4,11	4,36	4,41	4,46	4,51	4,35	4,45	4,51	4,55
22	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,10	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55
23	Balai Besar POM di Jayapura	4,08	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55
24	Balai POM di Palu	4,02	3,46	3,81	4,16	4,51	4,20	4,40	4,51	4,55
25	Balai Besar POM di Jakarta	4,00	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51
26	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,98	3,46	3,81	4,16	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51
27	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	3,97	4,06	4,21	4,36	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
28	Balai POM di Gorontalo	3,96	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
29	Balai POM di Pangkal Pinang	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
30	Balai POM di Kupang	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
31	Balai Besar POM di Makassar	3,95	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
32	Balai POM di Batam	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
33	Balai Besar POM di Manado	3,91	3,76	4,01	4,26	4,51	4,20	4,30	4,40	4,51	4,51
34	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,90	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
35	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,89	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
36	Balai POM di Sofifi	3,86	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
37	Balai Besar POM di Medan	3,84	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
38	Balai Besar POM di Pontianak	3,83	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
39	Balai Besar POM di Palembang	3,80	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
40	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,80	3,46	3,81	4,16	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
41	Direktorat Registrasi Obat	3,79	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51

No	Unit Pelayanan Publik	IPP	Target Sebelumnya					Usulan Perubahan Target			
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
42	Balai POM di Kendari	3,79	3,76	4,01	4,26	4,51	4,01	4,20	4,40	4,51	4,51
43	Balai Besar POM di Banjarmasin	3,69	3,46	3,81	4,16	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	4,51
44	Balai Besar POM di Banda Aceh	3,54	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	4,51
45	Balai Besar POM di Palangka Raya	3,52	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	4,51
46	Balai POM di Jambi	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	4,51
47	Balai POM di Mamuju	3,49	3,46	3,81	4,16	4,51	3,75	4,01	4,25	4,51	4,51
Rata-rata		4,04	3,77	4,02	4,26	4,51	4,21	4,34	4,46	4,55	4,55
Target IPP BPOM			3,76	4,01	4,26	4,51	4,16	4,28	4,39	4,51	4,51

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NOTA DINAS
No. TI.01.02.81.812.04.21.228

Kepada Yth. : Sekretaris Utama Badan POM
Tembusan Yth. : 1. Deputi Bidang Penindakan
2. Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Perihal : Laporan Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama
Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN
Tanggal : 20 April 2021

Berdasarkan Nota Dinas kami sebelumnya nomor B-TI.01.02.81.812.03.21.67 tanggal 29 Maret 2021 perihal Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama Kementerian PAN dan RB (terlampir 2), BPPT dan BSSN, bersama ini kami laporkan hal – hal sebagai berikut:

1. Acara sosialisasi telah dilaksanakan pada atnggal 12 – 13 April 2021 dengan dihadiri oleh narasumber dari Kemenetrian PAN dan RB, BPPT dan BSSN serta peserta dari 17 unit teknis di Pusat.
2. Dalam paparannya disampaikan bahwa **penilaian SPBE dengan tools sesuai PermenPANRB terbaru nomor 59 tahun 2020, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai saat menggunakan tools PerMenPANRB sebelumnya yaitu nomor 5 tahun 2018**. Hal ini dikarenakan penilaian sudah dengan perluasan ruang lingkup dengan 47 indikator, dari sebelumnya 35 indikator.
3. Penilaian dengan tools baru ini menyebabkan adanya perbedaan nilai dan **nilai indeks SPBE Nasional menjadi seakan – akan mengalami penurunan. Begitu juga dengan indeks SPBE Badan POM**, yang saat itu menggunakan tools SPBE lama telah mendapatkan nilai 3,68 di tahun 2019, setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan tools baru juga seakan - akan mengalami penurunan (terlampir 1). Hasil indeks SPBE dengan tools baru ini yang akan digunakan sebagai *baseline* pengukuran selanjutnya.
4. Terkait hal tersebut, diperlukan penyesuaian kembali terhadap target Renstra BPOM untuk Indeks SPBE. Bersama ini kami mengusulkan target terbaru (terlampir 1)

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut, terima kasih.



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

Lampiran 1
Nota Dinas Nomor :

1. Simulasi KemenPAN dan RB terhadap capaian SPBE BPOM tahun 2019

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**

PERATURAN MENTERI PANRB NO 59 TAHUN 2020

**Prediksi
Perubahan
Nilai SPBE**

Berisi Peraturan Pelaksanaan Penetapan dan Evaluasi SPBE
Dengan adanya perubahan dasar pelaksanaan Penetapan dan
Evaluasi SPBE yaitu dari Peraturan Menteri PAN & RB No 5 Tahun
2018 menjadi Peraturan Menteri PAN & RB No 59 Tahun 2020
Menyebabkan adanya perbedaan penghitungan Indeks

Nama Instansi	Indeks SPBE 2020	Imputasi ¹ 1	Imputasi ¹ 2	Imputasi ¹ 3
Nasional	2,26	1,75	2,55	1,98
KemenPANRB	3,09 ²	2,22	3,03	2,46
BPOM	3,48 ²	2,77	3,52	2,97

¹Penetapan nilai pada indikator yang kurang dengan nilai terdapat.
² Nilai pada tahun 2019

2. Usulan target SPBE tahun 2021 – 2024, berdasarkan baseline simulasi KemenPAN dan RB

Tahun	2019	2021	2022	2023	2024	Keterangan
Target	2,37	2,57	2,77	2,97	3,17	Tahun 2019, di ambil berdasarkan nilai imputasi 1 dan 2

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN**

NOTA DINAS
No. B-TL.01.02.81.812.03.21.67

Kepada Yth. : Sekretaris Utama Badan POM
Tembusan Yth. : Deputi Bidang Penindakan
Dari : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Perihal : Kegiatan Sosialisasi SPBE BPOM bersama Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN
Tanggal : 29 Maret 2021

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Badan POM perlu melakukan review kembali terhadap kebijakan SPBE yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai peraturan tersebut di atas, terdapat perluasan lingkup audit yang akan mulai diimplementasikan di tahun 2021. Penilaian yang sebelumnya dilakukan terhadap 35 indikator, saat ini menjadi 47 indikator, yang di dalamnya mencakup kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE.

Saat ini SPBE bukan hanya audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berfokus pada aplikasi, infrastruktur dan keamanan TIK dimana standarnya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun SPBE menjadi parameter penilaian tingkat kematangan keseluruhan sistem pada suatu organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan dukungan dari pimpinan serta seluruh unit teknis dalam persiapannya.

Dalam rangka pendalaman pemahaman terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 tahun 2020, serta dimulainya penyiapan dokumen SPBE sesuai peraturan tersebut, maka Pusdatin akan melakukan sosialisasi dengan mengundang Narasumber dari Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan sharing dari narasumber ini maka Badan POM dapat lebih siap dalam persiapan audit SPBE ini. Berikut kami sampaikan juga draft undangan sosialisasi SPBE Badan POM untuk narasumber Kementerian PAN dan RB, BPPT dan BSSN.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut. Terima Kasih.


Syamsidar Thamrin, ST, MBA

7. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Indikator	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	77	79	81	83	Deputi I
2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	73	75	77	79	Deputi II
3	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan makanan	76	78	80	81	Deputi III

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
(Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-Pl.06.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	87	88	89	90
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	87	88	89	90
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	87	88	89	90
2.1	Direktorat Registrasi Obat	85	86	87	88
2.2	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	87	88	89	90
2.3	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	89	90	91	92
2.4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	87	88	89	90
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83,50	84,38	85,25	86,13
3.1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	84	85	86
3.2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87	88	89	90
3.3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	84	84,5	85	85,5
3.4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	80	81	82	83
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	84	85	86	87
4.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	84	85	86	87
4.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	84	85	86	87

12. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

(Mengacu Nota Dinas Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61 Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di Lingkungan BPOM)

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	4,51	4,55	4,60	4,65
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	4,51	4,55	4,60	4,65
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	4,12	4,28	4,44	4,53
2.1	Direktorat Registrasi Obat	4,01	4,20	4,40	4,51
2.2	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	4,01	4,20	4,40	4,51
2.3	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	4,20	4,40	4,51
2.4	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	4,45	4,51	4,55	4,60

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,37	4,37	4,46	4,55
3.1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4,35	4,45	4,51	4,55
3.2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,35	4,45	4,51	4,55
3.3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	4,40	4,51	4,55	4,60
3.4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	-	4,01	4,25	4,51
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	4,32	4,42	4,51	4,58
4.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	4,35	4,45	4,51	4,55
4.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,60	4,65	4,70	4,75
4.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,45	4,51	4,55	4,60
4.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	4,20	4,30	4,40	4,51
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,01	4,20	4,40	4,51
5	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	4,20	4,30	4,40	4,51

15. Indeks RB BPOM

a. Cascading Indeks RB BPOM Per Area Perubahan

No	Area Perubahan	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Manajemen Perubahan	4,61	4,66	4,71	4,75	PPSDM
2	Deregulasi Kebijakan	4,38	4,50	4,63	4,75	Settama (Biro Hukor)
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	7,39	7,41	7,43	7,45	Settama (Biro Hukor)
4	Penataan Tatalaksana	5,24	5,47	5,71	5,94	Settama (Biro Hukor)
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,13	5,59	6,04	6,50	Settama (Biro SDM)
6	Penguatan Akutabilitas	4,22	4,48	4,74	5,00	Settama (Biro Renkeu)
7	Penguatan Pengawasan	5,98	6,02	6,06	6,10	Ittama (Inspektorat I & Inspektorat II)
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,67	5,76	5,85	5,94	Settama (Biro Hukor)

b. Indeks RB Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	79,5	81,5	83,5	85,5
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	85,8	87,8	89,8	91,8
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	72,2	74,7	77,2	79,7
1.3	Biro Umum	82,2	83,2	84,2	85,2
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	82,5	83,5	84,5	85,5
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	75,0	78,5	82,0	85,5

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
2	Inspektorat Utama	80,6	81,6	82,6	83,6
2.1	Inspektorat I	77,0	78,0	79,0	80,0
2.2	Inspektorat II	84,1	85,1	86,1	87,1
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	86,7	88,3	89,9	91,5
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	85,3	87,3	89,3	91,3
3.2	Direktorat Registrasi Obat	86,1	88,1	90,1	92,1
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	84,4	86,4	88,4	90,4
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	90,2	91,2	92,2	93,2
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	87,4	88,4	89,4	90,4
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	82,9	85,0	87,1	89,2
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,8	86,3	88,8	91,3
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	84,7	87,2	89,7	92,2
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83,0	85,5	88,0	90,5
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	80,0	81,0	82,0	83,0
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82,9	85,0	87,1	89,2
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89,0	90,1	91,2	92,3
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,4	88,4	89,4	90,4
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	97,7	98,2	98,7	99,2
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	84,5	85,5	86,5	87,5
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86,0	88,0	90,0	92,0
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	89,6	90,6	91,6	92,6
6	Deputi Bidang Penindakan	73,7	76,0	78,4	80,7
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	79,9	83,4	86,9	90,4
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	79,8	80,8	81,8	82,8
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	73,7	76,0	78,4	80,7
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	61,3	63,8	66,3	68,8

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	86,6	87,6	88,6	89,6
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	81,7	85,2	88,7	92,2
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,7	87,7	89,7	91,7
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	79,2	80,2	81,2	82,2

16. Nilai AKIP BPOM

a. Cascading Nilai AKIP BPOM Per Komponen Penilaian

No	Komponen Penilaian	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Perencanaan Kinerja	23,68	23,97	24,26	24,56	Settama (Biro Renkeu)
2	Pengukuran Kinerja	20,44	20,69	20,94	21,20	Settama (Biro Renkeu)
3	Pelaporan Kinerja	12,44	12,60	12,75	12,91	Settama (Biro Renkeu)
4	Evaluasi Internal	8,56	8,66	8,77	8,88	Ittama (Inspektorat I & II)
5	Capaian Kinerja	15,88	16,07	16,27	16,47	Settama (Biro Renkeu)

b. Nilai AKIP Unit Organisasi

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	83,0	85,3	87,6	89,9
2	Inspektorat Utama	82,3	84,8	87,3	89,8
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	79,7	82,2	84,7	87,2
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	79,3	80,8	82,3	83,8
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	77,8	79,3	80,8	82,3
6	Deputi Bidang Penindakan	79,7	81,2	82,7	84,2
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	77,2	78,7	80,2	81,7
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	76,6	78,1	79,6	81,1
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	77,7	79,2	80,7	82,2
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	81,9	84,4	86,9	89,4

17. Indeks Profesionalitas ASN BPOM

(Mengacu Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor PR.01.02.024.241.05.21.01 Tanggal 10 Mei 2021 Perihal Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM)

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	79,60	80,60	81,60	82,60
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	84,00	85,00	86,00	87,00
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	81,00	82,00	83,00	84,00
1.3	Biro Umum	74,00	75,00	76,00	77,00
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	78,00	79,00	80,00	81,00
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	81,00	82,00	83,00	84,00
2	Inspektorat Utama	84,28	84,72	85,15	85,58
2.1	Inspektorat I	87,10	87,15	87,20	87,25
2.2	Inspektorat II	85,75	86,00	86,25	86,50
2.3	Bagian TU Inspektorat Utama	80,00	81,00	82,00	83,00
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	82,60	83,33	84,06	84,77
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81,00	82,00	83,00	84,00
3.2	Direktorat Registrasi Obat	88,50	88,90	89,30	89,60
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	87,50	87,75	88,00	88,25
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	78,00	79,00	80,00	81,00
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	78,00	79,00	80,00	81,00
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	84,20	84,85	85,50	86,15
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87,50	88,00	88,50	89,00
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,00	86,50	87,00	87,50
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,50	82,75	83,00	83,25
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	81,00	82,00	83,00	84,00
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	84,00	85,00	86,00	87,00
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	84,55	85,00	85,45	85,90
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,00	86,50	87,00	87,50
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	79,00	80,00	81,00	82,00

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,75	87,00	87,25	87,50
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	84,75	85,00	85,25	85,50
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86,25	86,50	86,75	87,00
6	Deputi Bidang Penindakan	84,13	84,80	85,48	86,15
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	84,00	84,50	85,00	85,50
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	83,00	84,00	85,00	86,00
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,50	86,70	86,90	87,10
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	83,00	84,00	85,00	86,00
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	86,00	86,25	86,50	87,00
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,50	86,70	86,90	87,00
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,50	85,75	86,00	86,25
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	77,00	78,00	79,00	80,00

18. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	2	2,25	2,5	3
1.1	Biro Hukum dan Organisasi	2	2,25	2,5	3
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	2	2,25	2,5	3
1.3	Biro Umum	2	2,25	2,5	3
1.4	Biro Sumber Daya Manusia	2	2,25	2,5	3
1.5	Biro Kerjasama dan Humas	2	2,25	2,5	3
2	Inspektorat Utama	2	2,25	2,5	3
2.1	Inspektorat I	2	2,25	2,5	3
2.2	Inspektorat II	2	2,25	2,5	3
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.1	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
3.2	Direktorat Registrasi Obat	2	2,25	2,5	3
3.3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	2	2,25	2,5	3
3.4	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	2	2,25	2,5	3

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
3.5	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	2	2,25	2,5	3
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	2	2,25	2,5	3
4.4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	2	2,25	2,5	3
4.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	2	2,25	2,5	3
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.1	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.2	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.3	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.4	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
5.5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2	2,25	2,5	3
6	Deputi Bidang Penindakan	2	2,25	2,5	3
6.1	Direktorat Cegah Tangkal	2	2,25	2,5	3
6.2	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
6.3	Direktorat Siber Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
6.4	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	2	2,25	2,5	3
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	2	2,25	2,5	3

19. Nilai Kinerja Anggaran BPOM

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Sekretariat Utama	93.0	93.6	94.2	94.8
2	Inspektorat Utama	93.9	94.5	95.7	96.9
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	97.2	97.3	97.4	97.5
4	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92.3	92.9	94.1	95.3
5	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	91.9	92.5	93.7	94.9
6	Deputi Bidang Penindakan	93.0	93.6	94.8	96.0

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	93.5	94.1	95.3	96.5
8	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90.7	91.3	92.5	93.7
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	92.2	92.8	94.0	95.2
10	Pusat Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	93.0	93.6	94.8	96.0

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Seluruh Unit Organisasi/Satker	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)

Lampiran 5. Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2020 Tahap IV



Nomor : T-PR.03.01.10.106.07.21.507 Jakarta, 29 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV

Yth.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
c.q Bagian Perencanaan
di tempat

Sehubungan dengan surat dari Ibu Sekretaris Utama No. B-PR.03.01.2.21.07.21.363 Tanggal 26 Juli 2021, perihal Permintaan Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV, berikut kami kirimkan Usulan Perubahan Target dan Alokasi berdasarkan APBN-P 2021 Tahap IV beserta justifikasi nya pada satker Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

\

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional



Mohamad Kashuri, S.Si, Apt, M.Farm

Tembusan Yth.
Ibu Sekretaris Utama (sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSN

Lampiran

Surat Nomor : T-PR.03.01.10.106.07.21.507

KRO	RO	Satuan	DIPA TA 2021		APBN-P Tahap IV		Keterangan/Justifikasi
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
EAH - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001-Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)	Layanan	25	2.692.760	23	2.061.987.000	Dengan adanya penyesuaian sistem kerja baru selama pandemi (WFH) untuk para penguji di lab BB/BPOM sehingga tidak menambah ruang lingkup pengujian
TAH - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001-Sistem laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan Grand Design	Layanan	1	2.000.000	1	1.221.634.000	1. Kegiatan yang semula dilakukan melalui pihak ketiga, dilakukan melalui swakelola 2. Kegiatan benchmark dan beberapa kunjungan ke Balai POM ditiadakan secara daring.
CAB - Sarana di Bidang Kesehatan	006-Layanan Sarana Pelayanan Pengujian Obat dan Makanan	Paket	90	1.800.000	80	1.080.106.000	Adanya penghematan anggaran sehingga yang dilaksanakan pengadaan APD dalam rangka pengembangan pengujian
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	001-Metode analisis pengujian obat dan makanan yang dikembangkan	NSPK	200	51.520.237	152	39.580.789.000	1. Pengadaan peralatan, reagen dan baku pembanding yang ditunda sehingga pengembangan MA tidak dapat terlaksana seluruhnya 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengembangan MA di laboratorium tidak dapat terlaksana sesuai target
AEE - Kemitraan	001-Jejarang Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang berpartisipasi aktif	Kesepa katan	8	1.234.258	7	1.088.077.000	Pengurangan anggaran untuk reagen kolaborasi metode pengujian dalam rangka partisipasi jejaring

KRO	RO	Satuan	DIPA TA 2021		APBN-P Tahap IV		Keterangan/Justifikasi
			Target	Anggaran	Target	Anggaran	
DDA - Penelitian dan Pengembangan Produk	001-Baku yang dikembangkan	Produk	85	1.655.460	77	1.506.177.000	1. Pengurangan anggaran untuk pengadaan bahan baku serta pengurangan konsumsi untuk pembahasan yang dialihkan pelaksanaannya secara daring (full) 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengembangan baku pembanding tidak dapat dilaksanakan dengan optimal
BIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	001-Alat Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	Produk	3061	1.017.759	2893	993.845.000	1. Pengurangan anggaran 2. Penyesuaian waktu kerja (WFH) 3. Adanya pembatasan perjalanan sehingga tidak memungkinkan ke BB/BPOM
	002-Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	Produk	1880	6.595.727	1710	6.289.560.000	1. Kegiatan yang semula luring diubah menjadi daring 2. Efisiensi anggaran kegiatan 3. Penyesuaian waktu kerja (WFH) menyebabkan pekerjaan pengujian pembanding tidak dapat dilaksanakan dengan optimal